



SKRIPSI

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA
ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP PENDAPATAN PER
KAPITA MELALUI BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL
INTERVENING PADA WILAYAH INDUSTRI
PERIODE 2015-2022**

**Diajukan dalam rangka Penyelesaian Studi Strata 1
untuk Mencapai Gelar Sarjana Manajemen**

Oleh:

Titania Saputri

20810292

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Titania Saputri

NPM : 20810292

Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pendapatan Per Kapita Melalui Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Pada Wilayah Industri Periode 2015-2022”** yang saya buat ini adalah hasil karya saya sendiri dan belum pernah disampaikan untuk mendapatkan gelar pada Program Studi Manajemen atau pada program lainnya.

Karya ini adalah milik saya, karena itu pertanggungjawaban sepenuhnya berada di tangan saya.

Semarang, 30 April 2024



Titania Saputri
NPM 20810292

PERSETUJUAN PENYELESAIAN BIMBINGAN SKRIPSI

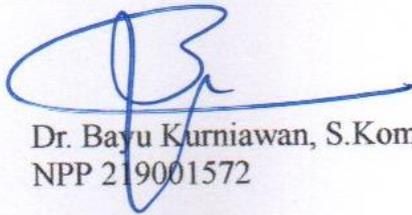
Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa Draft Skripsi yang
berjudul:

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum
(DAU) Terhadap Pendapatan Per Kapita Melalui Belanja Modal Sebagai
Variabel Intervening Pada Wilayah Industri Periode 2015-2022**

Disusun Oleh:
Titania Saputri
NPM. 20810292

Telah menyelesaikan Bimbingan Skripsi

Pembimbing I



Dr. Bayu Kurniawan, S.Kom., M.M.
NPP 219001572

Pembimbing II



Rita Meiriyanti, S.E., M.M.
NPP 218601571

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh:

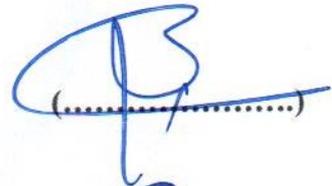
Nama : Titania Saputri
NPM : 20810292
Program Studi : Manajemen
Judul SKRIPSI : **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP PENDAPATAN PER KAPITA MELALUI BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA WILAYAH INDUSTRI PERIODE 2015-2022**

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji:

Tanggal : 27 Juni 2024

Dewan Penguji

Penguji I : Dr. Bayu Kurniawan, S.Kom., M.M.
NPP 219001572



Penguji II : Rita Meiriyanti, S.E., M.M.
NPP 218601571



Penguji III : Ika Indriasari, S.E., Akt., M.Si.
NIP 197608232005012001



PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul:

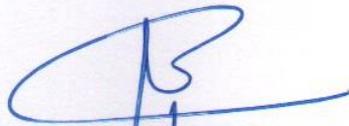
**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA
ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP PENDAPATAN PER KAPITA
MELALUI BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
PADA WILAYAH INDUSTRI PERIODE 2015-2022**

Disusun Oleh:
Titania Saputri
NPM. 20810292

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
pada tanggal, 27 Juni 2024

dan dinyatakan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk
memperoleh Gelar Sarjana Manajemen (S.M)
pada Program Studi Manajemen Universitas PGRI Semarang

Pembimbing I



Dr. Bayu Kurniawan, S.Kom., M.M.
NPP 219001572

Pembimbing II



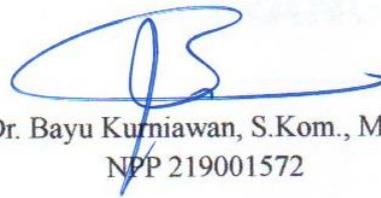
Rita Meiriyanti, S.E., M.M.
NPP 218601571



Dr. Heri Prabowo, S.E., M.M.
NPP 187901540

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dr. Bayu Kurniawan, S.Kom., M.M.
NPP 219001572

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

Whatever you do, do it with all your heart, as working for the Lord, not for men.

(Colossians 3:23)

Jika dulu kamu terinspirasi oleh orang hebat, maka sekarang kamulah yang menginspirasi mereka.

(Titania Saputri)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Almamater Universitas PGRI Semarang
2. Dosen Program Studi Manajemen
3. Orang tua penulis
4. Saudara/i penulis
5. Kekasih penulis
6. Sahabat penulis

ABSTRACT

Economic development is characterized by increasing productivity and per capita income of the population resulting in improvements in welfare. This research aims to examine the direct and indirect influence of local revenue and general allocation funds on per capita income through capital expenditure as an intervening variable. This research is research that uses secondary quantitative data tested using multiple regression methods using path analysis and the Sobel test. This research sample represents the population studied using a total sampling technique obtained from 5 districts/cities in industrial areas over an 8 year period. The data source for this research is the APBD Realization Report document obtained from the website of the Director General of Financial Balance and the Central Statistics Agency via the internet. Partially, it was found that the regional original income variable had a significant effect on capital expenditure and per capita income. However, partially general allocation funds do not have a significant effect on capital expenditure and general allocation funds and capital expenditure do not have a significant effect on per capita income. Based on the Sobel test, it shows that local original income and general allocation funds do not have a significant effect on per capita income through capital expenditure as an intervening variable.

Keywords: *Original Regional Income, General Allocation Funds, and Per Capita Income, and Capital Expenditures.*

ABSTRAKSI

Pembangunan ekonomi ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan pendapatan perkapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh langsung dan tidak langsung dari pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pendapatan per kapita melalui belanja modal sebagai variabel intervening. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan data kuantitatif sekunder diuji dengan metode regresi berganda pada analisis jalur dan uji sobel. Sampel penelitian ini mewakili populasi yang diteliti dengan teknik *total sampling* didapat 5 kabupaten/kota wilayah industri dengan 8 tahun periode. Sumber data penelitian ini melalui dokumen Laporan Realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik melalui internet. Secara parsial ditemukan bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dan pendapatan per kapita. Tetapi secara parsial dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal serta dana alokasi umum dan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan perkapita. Berdasarkan uji sobel menunjukkan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan perkapita melalui belanja modal sebagai variabel intervening.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Perkapita, dan Belanja Modal.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan YME yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga Skripsi yang berjudul **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP PENDAPATAN PER KAPITA MELALUI BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA WILAYAH INDUSTRI PERIODE 2015-2022”** dapat terselesaikan dengan baik. Terelesaikannya Skripsi ini tidak terlepas dari peran berbagai pihak itulah sebabnya, dalam dan melalui kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Sri Suciati, M.Hum. selaku Rektor Universitas PGRI Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi pada Program Studi Manajemen Universitas PGRI Semarang.
2. Dr. Heri Prabowo, S.E., M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi pada Program Studi Manajemen Universitas PGRI Semarang.
3. Dr. Bayu Kurniawan, S.Kom., M.M. selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi pada Program Studi Manajemen Universitas PGRI Semarang.
4. Dr. Bayu Kurniawan, S.Kom., M.M. selaku Pembimbing I yang selama proses penyusunan skripsi ini telah memberikan komentar, saran, kritik, dan koreksi dengan penuh perhatian, sabar, dan selalu mudah untuk bimbingan sejak awal penyusunan proposal hingga selesainya skripsi ini. Terima kasih Pak Bayu yang selalu dukung untuk lebih bisa dari teman-teman saya, perjalanan tidak mudah

dan banyak sekali tantangan yang beliau berikan, namun hal itu membuat saya untuk menjadi mahasiswa lebih kuat lagi, lebih bisa, dan berani untuk mencoba hal baru.

5. Rita Meiriyanti, S.E., M.M. selaku Pembimbing II yang selama proses penyusunan skripsi ini telah memberikan komentar, saran, kritik, koreksi, dan membantu ketika saya tidak paham dengan penuh perhatian sejak awal penyusunan proposal hingga selesainya skripsi ini. Terima kasih Bu Rita sudah menjadi motivasi saya bahwa hidup itu harus diusahakan, supaya apapun keinginan kita bisa terwujud untuk kehidupan lebih baik lagi.
6. Ibu Ismunarti selaku mama saya yang sudah pulang kerumah Tuhan. Terima kasih mama sudah menjadi semangat saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Beliau berpesan untuk terus menjalani hidup dengan kuat, mandiri, hebat, dan selalu menginspirasi banyak orang. Sehingga hari ini anak bungsunya dapat membanggakan beliau dengan gelar sarjana.
7. Saudari Kitri Apsari, Saudara Aletheia Zefanya, Saudari Gabriellia Hagen selaku kakak dan keponakan saya yang selalu memberikan dukungan, motivasi, tempatku berkeluh kesah dari banyaknya masalah dan tidak hentinya mendoakan untuk segera selesai studi saya. Hari ini pencapaian gelar sarjanaku sebagai tanda terima kasih kepada kakak dan keponakan saya.
8. Mas Ihsan selaku kekasih saya terima kasih telah berkontribusi banyak dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih yang selalu menemani proses hidup saya, selalu mendukung dalam keadaan suka maupun duka, semangat dan motivasi saya untuk terus berjuang sampai impian jadi kenyataan. Saat ini, beliau sedang

bertugas layar dengan jarak yang jauh, namun beliau selalu setia menemani saya melalui komunikasi *videocall* untuk mengerjakan skripsi ini hingga selesai. Terima kasih sudah menjadi rumah yang selalu ada dalam setiap kisah cerita thania.

9. Ester Diviena Permatasari, Mellisa Putri Adeliana, Lilla Nanda Aprita, dan Panca Cahya Ningrum selaku sahabat saya yang selalu memberikan semangat, bantuan kepada saya selama menempuh pendidikan dan mereka yang selalu mewarnai cerita thania. Terima kasih atas motivasi dan senantiasa mendoakan saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang terlibat dalam proses penelitian, penulisan, dan penyusunan skripsi saya hingga selesai.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PENYELESAIAN BIMBINGAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
ABSTRAKSI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	16
1.4 Tujuan Penelitian.....	17
1.5 Manfaat Penelitian.....	18
1.6 Sistematika Penulisan Skripsi.....	19
BAB II LANDASAN TEORI.....	21
2.1 Pendapatan Per Kapita.....	21
2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	24
2.3 Dana Alokasi Umum (DAU).....	27
2.4 Belanja Modal.....	28
2.5 Kajian Penelitian Terdahulu.....	32
2.6 Pengaruh antar Variabel dan Pengembangan Hipotesis.....	39
2.7 Model Empiris Penelitian.....	46

BAB III METODE PENELITIAN.....	47
3.1 Desain Penelitian.....	47
3.2 Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel	47
3.3 Pengembangan Pengukuran Variabel Penelitian	48
3.4 Teknik Pengumpulan Data	50
3.5 Teknik Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
4.1 Deskripsi Pengumpulan Data di Lapangan	58
4.2 Deskripsi Umum Objek Tempat Penelitian	61
4.3 Analisis Data	67
4.4 Pembahasan	89
BAB V PENUTUP.....	99
5.1 Kesimpulan.....	99
5.2 Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	105

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kajian Penelitian Terdahulu	32
Tabel 3. 1 Definisi Operasional dan Pengukuran	48
Tabel 4. 1 Wilayah Industri	58
Tabel 4. 2 Data PAD, DAU, Pendapatan Per Kapita, dan Belanja Modal Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Cikarang Tahun 2015-2022	59
Tabel 4. 3 Data PAD, DAU, Pendapatan Per Kapita, dan Belanja Modal Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang Tahun 2015-2022	59
Tabel 4. 4 Data PAD, DAU, Pendapatan Per Kapita, dan Belanja Modal Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya Tahun 2018-2022	60
Tabel 4. 5 Data PAD, DAU, Pendapatan Per Kapita, dan Belanja Modal Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik Tahun 2015-2022	60
Tabel 4. 6 Data PAD, DAU, Pendapatan Per Kapita, dan Belanja Modal Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam Tahun 2015-2022	60
Tabel 4. 7 Hasil Statistik Deskriptif	67
Tabel 4. 8 Hasil Uji K-S Persamaan Pertama	69
Tabel 4. 9 Hasil Uji K-S Persamaan Kedua	69
Tabel 4. 10 Hasil Uji Normalitas	70
Tabel 4. 11 Hasil Uji Multikolinearitas Persamaan Pertama	73
Tabel 4. 12 Hasil Uji Multikolinearitas Persamaan Kedua	73
Tabel 4. 13 Hasil Uji Multikolinearitas	74
Tabel 4. 14 Hasil Uji Glejser Persamaan Pertama	75
Tabel 4. 15 Hasil Uji Glejser Persamaan Kedua	76
Tabel 4. 16 Hasil Uji Heteroskedastisitas	76
Tabel 4. 17 Hasil Uji Durbin-Watson Persamaan Pertama	77
Tabel 4. 18 Hasil Uji Durbin-Watson Persamaan Kedua	77
Tabel 4. 19 Hasil Uji Autokorelasi	77
Tabel 4. 20 Hasil Uji Regresi Linear Berganda Persamaan Pertama	78
Tabel 4. 21 Hasil Uji Regresi Linear Berganda Persamaan kedua	79
Tabel 4. 22 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	79

Tabel 4. 23 Hasil Uji T Persamaan Pertama.....	81
Tabel 4. 24 Hasil Uji T Persamaan Kedua	82
Tabel 4. 25 Hasil Pengujian Hipotesis Secara Parsial	82
Tabel 4. 26 Hasil Uji F Persamaan Pertama.....	84
Tabel 4. 27 Hasil Uji F Persamaan Kedua	84
Tabel 4. 28 Hasil Pengujian Hipotesis Secara Simultan	84
Tabel 4. 29 Hasil Koefisien Determinasi Persamaan Pertama	85
Tabel 4. 30 Hasil Koefisien Determinasi Persamaan Kedua.....	85
Tabel 4. 31 Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi	85
Tabel 4. 32 Hasil Uji Sobel	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka berpikir.....	46
Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas Histogram Persamaan Pertama	71
Gambar 4. 2 Hasil Uji Normalitas Histogram Persamaan Kedua	71
Gambar 4. 3 Hasil Uji Normalitas P-Plot Persamaan Pertama	72
Gambar 4. 4 Hasil Uji Normalitas P-Plot Persamaan Kedua.....	72
Gambar 4. 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas Persamaan Pertama	74
Gambar 4. 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas Persamaan Kedua.....	75
Gambar 4. 7 Hasil Uji Sobel	87
Gambar 4. 8 Hasil Uji Sobel	88

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data PAD, DAU, Pendapatan Perkapita, dan Belanja Modal Kabupaten Bekasi.....	105
Lampiran 2 Data PAD, DAU, Pendapatan Perkapita, dan Belanja Modal Kota Semarang.....	107
Lampiran 3 Data PAD, DAU, Pendapatan Perkapita, dan Belanja Modal Kota Surabaya.....	109
Lampiran 4 Data PAD, DAU, Pendapatan Perkapita, dan Belanja Modal Kabupaten Gresik	111
Lampiran 5 Data PAD, DAU, Pendapatan Perkapita, dan Belanja Modal Kota Batam	113
Lampiran 6 <i>Output</i> SPSS Analisis Deskriptif.....	115
Lampiran 7 <i>Output</i> SPSS Uji Asumsi Klasik.....	116
Lampiran 8 <i>Output</i> SPSS Analisis Jalur.....	122
Lampiran 9 <i>Output</i> SPSS Uji Hipotesis	123
Lampiran 10 <i>Output</i> SPSS Uji Sobel	125
Lampiran 11 LOA	126
Lampiran 12 Turnitin	127
Lampiran 13 Buku Bimbingan.....	128

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dimulai adanya implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia yang ditandai dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah, membawa implikasi tersendiri dalam proses memaksimalkan pembangunan daerahnya secara optimal, tidak bergantung dengan pemerintah pusat melalui perubahan pola penerimaan dan pengeluaran daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sumber pembiayaan Pemerintah Daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi.

Dana Perimbangan Pemerintah Pusat-Daerah yang diberikan dalam UU No 33 Tahun 2004 meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) bersama dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber dana daerah yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan di tingkat daerah dengan kewenangan

menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja modal dengan menganut asas kesesuaian, kebutuhan dan kemampuan daerah. Kebijakan ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Pemerintah Daerah (PEMDA) yang memiliki kewenangan yang lebih besar untuk mengelola sumber daya wilayahnya secara efektif dan efisien. Kebijakan otonomi daerah seringkali disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM) dalam rangka desentralisasi fiskal.

Menurut Cahyono & Kumalasari (2021) melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, wewenang yang dimiliki pemerintah untuk menggali pendapatan serta menjalankan peran alokasi dengan mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Menurut Sasana (2012) Penelitian menyatakan desentralisasi fiskal diproksi dengan rasio dalam komponen pendapatan daerah dan pengeluaran daerah pada APBD. Pada daerah yang memiliki kemampuan keuangan yang belum tentu sama dalam mendanai kegiatannya, hal ini menjadi ketimpangan fiskal antar daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih memperhatikan alokasi dana yang bersumber dari APBN untuk mengatasi ketimpangan fiskal dalam keberagaman kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Adanya desentralisasi fiskal, diharapkan mampu mengelola dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah karena memiliki peluang lebih besar dari komponen penerimaan pemerintah akan terus meningkat. Pendapatan asli daerah yang meningkat dianggap mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan dapat memberikan dampak eksternalitas positif. Salah satu sumber utama

pendapatan yang diperoleh daerah, sehingga pendapatan asli daerah akan dipungut atas dasar peraturan daerah yang berlaku dan sesuai dari peraturan perundang-undangan. Tetapi pada realisasinya, pendapatan asli daerah hanya mampu membiayai belanja pemerintah maksimal sebesar 20% (Heriston Sianturi & Anastasya Astrid Eka Putri, 2018). Untuk mengatasi hal itu, pemerintah pusat berupaya memberi dana perimbangan pada setiap daerah.

Melalui dana perimbangan yang dikeluarkan pemerintah daerah salah satunya berupa Dana Alokasi Umum (DAU) untuk mengupayakan ketidakmerataan infrastruktur yang ada disetiap daerah. Hal ini dilakukan supaya tercipta pertumbuhan ekonomi yang merata diseluruh daerah. DAU merupakan dana dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan ke daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan setiap daerah dalam mewujudkan desentralisasi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa dana transfer dari Pemerintah Pusat meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil yang digunakan dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah. DAU berperan sebagai pemerataan fiskal antar daerah (*fiscal equalization*) di Indonesia. Selanjutnya, mengenai hal diluar peran tersebut penggunaan dana sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan. Maka dari itu, pemerintah kabupaten/kota diharuskan mampu mengelola dana secara efektif dan efisien dalam upaya peningkatan pelayanan pada masyarakat daerah dengan disertai

pertanggungjawaban adanya transparansi alokasi atas pengeluaran dana tersebut.

Peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan berbagai pelayanan publik bagi masyarakat tidak lepas dari pemerintah pusat. Sebagaimana Yustriawan (2021) menyatakan bahwa transfer dari pusat untuk pemerintah daerah berperan untuk menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri dan untuk mengurangi kesenjangan antar daerah. Adapun pendapatan per kapita daerah merupakan hal penting dalam menentukan seberapa besar dana alokasi umum (DAU) yang diterima daerah dari pusat, sebagaimana yang terdapat pada penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan.

Perubahan mendasar yang membawa regulasi baru dengan sebuah sistematika dan mekanisme pengelolaan pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal dapat memberi kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan daerah, tetapi berdampak pada persoalan baru dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang tidak sama satu dengan lainnya. Sehingga pemerintah memberikan transfer dana, sebagai upaya dana ini yang paling berkontribusi adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Dengan cara pengurangan disparitas fiskal ini diharapkan adanya dampak dari memberi transfer dana serta agar daerah mempunyai tingkat kesiapan fiskal yang relatif sama dalam mengimplementasikan otonomi daerah.

Beberapa tahun berjalan, proporsi dana alokasi umum terhadap daerah masih tergolong tinggi dibandingkan penerimaan daerah lain termasuk pendapatan asli daerah (PAD) (Sulaeman & Silvia, 2019). Namun hal ini, indikator dianggap tidak selalu sama dan sesuai karena upaya dalam meningkatkan sumber dana pendapatan asli daerah tidak akan memberikan dampak besar apabila tidak diikuti dengan pertumbuhan ekonomi daerah setempat. Pelaksanaan otonomi daerah diharuskan mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, daerah menjadi lebih mandiri, yang salah satunya faktor adanya peningkatan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) dalam hal pembiayaan daerah (Heliyanto & Handayani, 2016).

Suatu wilayah memiliki pertumbuhan perekonomian yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal dan sumber daya keuangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen struktur keuangan daerah yang penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, termasuk Pendapatan Per Kapita. Pendapatan Per Kapita pada tingkat daerah menjadi cerminan utama kesejahteraan ekonomi pada suatu wilayah. Pendapatan Per Kapita menjadi konsep rata-rata pendapatan yang diperoleh tiap individu disuatu populasi di tingkat daerah selama periode tertentu. Sangat penting untuk melakukan analisis Pendapatan Per Kapita terutama pada tingkat daerah karena dapat memberi pemahaman yang lebih baik tentang distribusi ekonomi, tingkat hidup masyarakat, dan pengaruh kebijakan pemerintah setempat.

Upaya desentralisasi Pemerintah pusat dalam kewenangannya memberikan dana transfer kepada Pemerintah Daerah (PEMDA). Tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan pada bagian pasal 28 ayat 2 berisi bahwa jumlah penduduk merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan akan penyediaan layanan publik di setiap antar daerah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini ingin mengetahui lebih dalam pengaruh keuangan daerah terhadap peningkatan Pendapatan Per Kapita.

Pendapatan Per Kapita merupakan pendapatan rata-rata yang diperoleh penduduk suatu negara selama waktu tertentu (biasanya periode satu tahun) dan menjadi salah satu tolak ukur kemakmuran dari suatu negara. Semakin tinggi Pendapatan Per Kapita suatu negara atau daerah, semakin besar kemungkinan pembangunan dan pendapatan penduduk di daerah tersebut. Selain itu ada juga indikator makro perekonomian yang digunakan mengukur kinerja ekonomi suatu negara adalah Produk Domestik Bruto (PDB). Dan pada tingkat wilayah, baik wilayah provinsi maupun kabupaten atau kota menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Menurut Haryanto (2008) dalam PDB terdapat bagian PDRB yang mana perubahan PDRB pada tingkat regional akan mempengaruhi PDB atau sebaliknya. Selain itu, PDRB merupakan jumlah total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari keseluruhan kegiatan ekonomi di suatu wilayah dalam periode tahun tertentu, biasanya satu tahun. PDRB digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi pada tingkat wilayah, baik

tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten atau kota. Biasanya PDRB Per Kapita diukur dari PDRB suatu wilayah dibagi banyaknya jumlah penduduk yang tinggal pada suatu wilayah tersebut untuk mengetahui tingkat ekonomi diwilayah dengan besarnya jumlah Pendapatan Per Kapita yang diperoleh.

Pendapatan Per Kapita daerah yang masih relatif kecil menghambat bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan yang akan semakin meningkat untuk terus memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat. Melalui studi ini penting untuk menunjukkan perbedaan tingkat kesejahteraan antar wilayah, menemukan ketidaksetaraan ekonomi, dan menjelaskan komponen-komponen yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi lokal. Sumber daya yang tersedia untuk menyediakan layanan publik, infrastruktur, dan upaya pengentasan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi suatu wilayah. Sehingga penting untuk merancang kebijakan yang sesuai dan efektif karena pendapatan per kapita di tingkat daerah dapat menunjukkan keberhasilan kebijakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sementara pendapatan per kapita rendah dapat menunjukkan masalah atau hambatan ekonomi.

Pendapatan per kapita diduga mampu memperkuat PAD. Semakin besar hasil pendapatan penduduk yang diperoleh masyarakat setempat maka menunjukkan seberapa besar kemampuan dari penduduk untuk membayar pajak atau retribusi juga semakin tinggi. Sehingga dapat menjadi acuan sumber pendapatan daerah dan membuat PAD semakin meningkat yang digunakan untuk memberikan pelayanan publik yang memadai. Apabila adanya peningkatan

PAD diduga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah setempat, maka terdapat kemungkinan bahwa pendapatan per kapita memperkuat pengaruh DAU. Karena pada dasarnya nilai DAU lebih besar dibandingkan kontribusi yang diperoleh dari dana PAD.

Ketersediaan pelayanan publik akan mendorong investor untuk berinvestasi sehingga mampu menyerap tenaga kerja yang tersedia di daerah yang pada gilirannya mengurangi tingkat pengangguran. Tingkat kegiatan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan secara langsung mampu meningkatkan pendapatan per kapita daerah. Sebagaimana Dalil (2020) menyatakan bahwa alokasi belanja modal dipergunakan dalam pengembangan dan perbaikan infrastruktur sehingga mendukung perekonomian yang menunjang tingkat produktivitas penduduk yang pada akhirnya meningkatkan perolehan pendapatan masyarakat setempat dan secara umum juga memberi pengaruh dalam tujuan meningkatkan pendapatan per kapita daerah.

Pendapatan per kapita merupakan ukuran yang digunakan untuk menggambarkan sebuah standar hidup. Negara yang memiliki pendapatan per kapita tinggi umumnya memiliki standar hidup yang tinggi juga. Perbedaan pendapatan mencerminkan perbedaan pada kualitas hidup. Negara kaya memiliki kualitas hidup yang lebih baik, hal tersebut tercermin antara lain dalam angka harapan hidup, tingkat kesehatan, dan tingkat pendidikan, jika dibandingkan dengan negara miskin. Pertumbuhan ekonomi daerah menjadi

faktor penting yang perlu diperhatikan dalam mencapai tingkat pendapatan per kapita.

Kualitas pelayanan publik berhubungan dengan tingkat belanja modal dalam menyediakan berbagai sarana dan pra sarana untuk kelancaran tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik (Situngkir, 2019). Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran pemerintah untuk pembentukan modal daerah dalam peningkatan kualitas daerah baik yang bersifat fisik dan non fisik. Dalam hal pembiayaan belanja modal, pemerintah daerah dituntut agar menggunakan anggaran pengeluaran yang mampu membangun kemandirian ekonomi daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang dapat diwujudkan oleh peningkatan pendapatan per kapita. Selain itu, meningkatkan pelayanan pada sektor publik, pemerintah harus mampu mengelola keuangan daerah dengan mengalokasikan pengeluaran daerah untuk mendorong produktivitas daerah. Sebagaimana Siswiyanti (2017) menyatakan bahwa alokasi belanja modal untuk pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian akan mendorong tingkat produktivitas penduduk yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan masyarakat dan secara umum akan meningkatkan pendapatan per kapita daerah.

Belanja modal menurut Yustriawan (2021) adalah pengeluaran anggaran yang dipergunakan untuk memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang berdampak memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Pengalokasian belanja modal pada daerah

didasarkan pada tingkat kebutuhan daerah terhadap sarana dan pra sarana dalam memberikan fungsi pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat.

Selanjutnya Romadhon & Aji (2021) menyatakan adanya aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal menjadi syarat utama dalam menunjang pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Dengan demikian belanja modal menjadi acuan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang bersifat menambah aset tetap atau inventaris yang dampak yang diperoleh dari manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran sebagai biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, peningkatan dalam kapasitas, dan kualitas aset.

Belanja modal yang dilakukan melalui mengembangkan dan meningkatkan sektor pendidikan, kesehatan, dan transportasi agar masyarakat juga mendapat manfaat dari pembangunan daerah (Romadhon & Aji, 2021). Menurut penelitian Frelistiyani (2010) strategi alokasi anggaran pembangunan ini dapat mendorong dan mempercepat pembangunan perekonomian nasional, dan juga menjadi alat untuk mengurangi ketimpangan wilayah. Oleh karena itu, tidak logis bila sebagian besar anggaran dialokasikan untuk belanja sehari-hari (Abimanyu, 2019).

Pendapat ini menekankan pentingnya mengalokasikan pengeluaran untuk barang publik. Menurut Adi (2019) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di sektor industri memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pajak daerah (pajak erat kaitannya dengan kegiatan PAD) Selain

retribusi, merupakan salah satu komponen PAD yang terbesar. Sektor industri adalah kegiatan investasi dalam jumlah besar ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan per kapita, yang pada akhirnya akan menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi pemerintah daerah (Saragih, 2018).

Dari segi administratif, Indonesia terbagi menjadi beberapa kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai karakteristik dan kemungkinan berbeda yang mempengaruhi pendapatan dan belanja daerah terutama pada wilayah industri menjadi sorotan pusat pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah yang mempengaruhi pendapatan per kapita wilayahnya. Oleh karena itu, pemahaman tentang variabel yang mempengaruhi pendapatan per kapita di wilayah industri dapat membantu pemerintah daerah merancang kebijakan pembangunan daerah yang lebih efisien, terutama pada wilayah industri. Salah satu indikator penting untuk mengukur kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan per kapita melalui peningkatan pendapatan per kapita di daerah industri dapat berdampak positif pada tingkat kesejahteraan penduduk setempat.

Menurut penelitian Mentayani (2015) membuktikan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap pendapatan perkapita, dana alokasi umum berpengaruh negatif secara signifikan terhadap pendapatan perkapita dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap pendapatan perkapita. Menurut hasil penelitian Pubra (2019) membuktikan secara individual Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap

pendapatan per kapita dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap pendapatan per kapita. Menurut penelitian Novita (2022) membuktikan Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Per Kapita, Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Pendapatan Per Kapita, Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Per Kapita.

Berdasarkan penelitian Yustriawan (2021) menyatakan hasil pengujian ini membuktikan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Per Kapita melalui belanja modal sebagai variabel intervening. Adapun persamaan dari kedua penelitian ini terletak pada variabel dependen dan variabel intervening, namun ada perbedaan penelitian ini terletak pada tahun penelitian, populasi penelitian, obyek penelitian, dan pengambilan variabel independen hanya DAU serta ada penambahan variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam penelitian ini dikenalkan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening dalam hubungan antara Dana Alokasi Umum dan Pendapat Asli Daerah dengan Pendapatan Per Kapita.

Penelitian ini meneliti wilayah industri seperti Kabupaten Bekasi yaitu Cikarang, Kota Semarang, Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Kota Batam sangat berperan strategis untuk kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi regional dan nasional. Kesuksesan dalam meningkatkan pendapatan per kapita suatu wilayah industri tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal seperti infrastruktur dan sumber daya manusia melainkan kebijakan dan alokasi sumber daya keuangan pemerintah daerah juga berperan penting. Maka dengan

2 variabel X sebagai sumber pendapatan daerah antara lain : PAD dan DAU dapat dipelajari bagaimana sumber-sumber pendapatan ini dapat mempengaruhi Pendapatan Perkapita daerah industri melalui 1 variabel Z yaitu Belanja Modal yang pengumpulan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai sektor ekonomi lokal, Dana Alokasi Umum (DAU) bersumber dari pendapatan APBN yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan tujuan pemerataan keuangan daerah, 2 variabel X ini memiliki potensi terhadap peningkatan pendapatan perkapita pada wilayah industri melalui belanja modal yang juga membantu mengelola keuangan daerah menjadi lebih baik.

Selain itu 2 variabel X seperti PAD dan DAU dapat menjadi gambaran tentang kondisi ekonomi disuatu wilayah industri terutama Kabupaten Bekasi yaitu Cikarang, Kota Semarang, Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Kota Batam yang diteliti. Diharapkan hasil penelitian ini mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan pengalokasian anggaran yang lebih sesuai kebutuhan dan skala prioritas yang mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas serta mengembangkan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, termasuk alokasi dana serta sumber pendapatan daerah terhadap pendapatan perkapita melalui belanja modal dengan berbagai karakteristik yang berbeda. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik menganalisis penelitian dengan judul **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP PENDAPATAN PER KAPITA MELALUI BELANJA MODAL SEBAGAI**

VARIABEL INTERVENING PADA WILAYAH INDUSTRI PERIODE 2015 – 2022”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, kemandirian daerah menjadi kebutuhan yang paling penting dan tidak dapat dihindari. Pemerintah daerah harus mampu mengatasi keterbatasan sumber daya dengan tetap memperhatikan kewenangan yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat mengenai pengaturan pemerintahan daerahnya masing-masing. Kemandirian yang diperlukan adalah daerah harus mampu mengatur dan mengendalikan segala bentuk pendapatan dan pembiayaan tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Dimana PAD dianggap mampu menjadi sumber utama pendapatan yang diperoleh daerah yang menjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah untuk mencapai tingkat pendapatan per kapita daerah industri yang tinggi. Namun, adanya perbedaan hasil yang mana pendapatan per kapita mampu memperkuat DAU karena umumnya nilai DAU lebih besar dibandingkan kontribusi PAD yang dimiliki masing-masing daerah (Imanulloh & Purwanti, 2017).

Permasalahan terkait persyaratan tersebut, yakni adanya disparitas anggaran antar daerah pun muncul sehingga memaksa pemerintah memberikan dukungan kepada daerah dalam bentuk dana kompensasi (transfer), termasuk Dana Hibah Umum. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan penuh untuk

menggunakan dana kompensasi tersebut. Namun dengan adanya kewenangan tersebut, daerah harus mampu menggunakan dana kompensasi secara efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan publik.

Dana DAU diterima dari pemerintah akan berpengaruh pada peningkatan PAD, sehingga diharapkan mampu dialokasikan dalam belanja modal untuk meningkatkan PAD tersebut. PAD naik maka DAU yang diberikan pemerintah akan berubah karena PAD tinggi dianggap memiliki kemandirian dalam memanfaatkan dana untuk meningkatkan pendapatan per kapita wilayahnya. Namun, terkadang PAD tinggi tidak bisa konsistensi pada kebijakan yang dibuat pemerintah melainkan memberatkan perekonomian daerah tersebut. Contohnya kebijakan pemerintah apabila menaikkan tarif pajak yang justru memberatkan pelaku ekonomi, seharusnya pemerintah berfokus meningkatkan ekonomi wilayah tersebut dibanding menetapkan kebijakan yang menghambat peningkatan pendapatan per kapita suatu wilayah.

Wilayah industri dianggap memiliki PAD yang cukup besar, disamping itu wilayah industri mengharapkan modal besar (dana perimbangan) dari pemerintah dalam meningkatkan kualitas kegiatan industri dan perekonomian masyarakat untuk memperoleh pendapatan per kapita di daerah industri tersebut meningkat. Hal ini juga berdampak pada pembangunan perekonomian nasional, karena daerah industri berfokus pada kegiatan industri yang secara signifikan akan mendongkrak perekonomian regional sekaligus nasional.

Salah satu solusi untuk meningkatkan pelayanan publik adalah dengan melakukan penanaman modal. Peningkatan penanaman modal diharapkan

dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik terhadap pembangunan yang tercermin dari peningkatan PAD (Marliana et al., 2022). Kegiatan investasi dalam jumlah besar ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pada gilirannya memberikan pendapatan yang signifikan bagi pemerintah daerah (Frelistiyani, 2010).

Permasalahan lainnya pada penelitian terhadap Pendapatan Per Kapita Wilayah masih jarang diteliti, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai variabel tersebut. Serta adanya kesenjangan dan *research gap* dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, pertanyaan penelitian secara spesifik yaitu:

- 1) Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Pendapatan Per Kapita Pada Wilayah Industri Periode 2015 – 2022?
- 2) Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Pendapatan Per Kapita Pada Wilayah Industri Periode 2015 – 2022?
- 3) Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal Pada Wilayah Industri Periode 2015 – 2022?
- 4) Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal Pada Wilayah Industri Periode 2015 – 2022?
- 5) Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Pendapatan Per Kapita Melalui Belanja Modal Pada Wilayah Industri Periode 2015 – 2022?

- 6) Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Pendapatan Per Kapita Melalui Belanja Modal Pada Wilayah Industri Periode 2015 – 2022?
- 7) Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Pendapatan Per Kapita Pada Wilayah Industri Periode 2015 – 2022?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Per Kapita pada Wilayah Industri Periode 2015 – 2022.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pendapatan Per Kapita pada Wilayah Industri Periode 2015 – 2022.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pada Wilayah Industri Periode 2015 – 2022.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Wilayah Industri Periode 2015 – 2022.
- 5) Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Per Kapita melalui Belanja Modal pada Wilayah Industri Periode 2015 – 2022.
- 6) Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pendapatan Per Kapita melalui Belanja Modal pada Wilayah Industri Periode 2015 – 2022.
- 7) Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Per Kapita pada Wilayah Industri Periode 2015 – 2022.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dalam menambah ilmu pengetahuan dibidang sumber pendapatan daerah dan dana perimbangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terkhusus DAU. Serta dapat mengetahui pengaruh PAD dan DAU terhadap pendapatan per kapita melalui belanja modal. Selain itu sebagai bentuk implementasi ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan di Universitas PGRI Semarang. Harapan dari penelitian ini bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini sebagai dasar dalam pengambilan keputusan kebijakan pemerintah daerah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah (APBD). Kemandirian keuangan daerah yang tidak bergantung pada pemerintah pusat dan pengalokasian belanja modal yang lebih tepat sasaran. Penelitian ini dapat menjadi informasi dan masukan kepada pemerintah daerah yang berkaitan dengan pendapatan per kapita masyarakat dalam memanfaatkan dana transfer daerah dari pemerintah pusat yang dikelompokkan dalam klasifikasi besar yaitu dana perimbangan seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) secara proposional dan disajikan secara transparan sehingga dapat mewujudkan *good governance*.

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Secara sistematis susunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berhubungan dan disusun secara terperinci untuk memberikan gambaran sekaligus mempermudah pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi mengenai pendahuluan yang menjabarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis.

BAB II Landasan Teori

Berisi mengenai teori dan landasan penelitian. Selain itu juga menjabarkan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi referensi peneliti. Pada bab ini peneliti memaparkan model empiris dari penelitian yang dilakukan.

BAB III Metode

Berisi mengenai metode dan model yang digunakan dalam penelitian ini. Mulai dari desain penelitian, populasi dan sampel, teknik analisis data serta teknik pengumpulan data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi mengenai penjabaran dan interpretasi setelah pengolahan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Hasil dari penelitian yang dijabarkan peneliti termasuk hasil dari hipotesis yang telah dirumuskan.

BAB V Penutup

Berisi mengenai ringkasan dari hasil yang diperoleh pasca penelitian. Serta penjabaran saran yang berisi tindakan yang perlu dilakukan sejalan dengan hasil yang diperoleh setelah penelitian.

Daftar Pustaka

Berisi mengenai referensi atau acuan yang digunakan dalam penelitian berupa kuripan langsung maupun tidak langsung. Daftar Pustaka memuat semua bahan Pustaka yang telah dikutip dalam wujud teori, pendapat, ilmu pengetahuan, maupun data sekunder yang telah dipublikasi.

Lampiran

Berisi mengenai daftar sampel yang digunakan, penelitian yang dilakukan, dan berbagai tambahan lain yang mendukung penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita merupakan besaran pendapatan yang diperoleh rata-rata penduduk yang diperoleh dari hasil bagi pendapatan nasional suatu negara pada tahun tertentu dengan jumlah penduduk negara pada tahun tersebut (Siswiyanti, 2017). Menurut P. Sari (2017) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah penduduk dapat mempengaruhi pendapatan per kapita. Pendapatan rata-rata yang telah diperoleh suatu daerah atau wilayah merupakan cerminan dari pendapatan per kapita daerah. Oleh sebab itu, pendapatan daerah besar menggambarkan masyarakat yang cenderung mengeluarkan lebih besar untuk kebutuhannya, sehingga kebutuhannya dapat terpenuhi.

Produk Domestik Regional Bruto terbagi atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku merupakan gambaran nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan merupakan gambaran sebagai dasar nilai tambah barang dan jasa diperoleh dari menghitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku untuk mengetahui pergeseran dan struktur dari ekonomi, sedangkan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan berlaku untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Melalui adanya pendapatan per kapita sebagai dasar dalam mengukur kemampuan dari

suatu daerah atau wilayah untuk memperbesar output laju yang lebih cepat daripada tingkat pertumbuhan penduduk. Tingkat dan laju pertumbuhan pendapatan per kapita menjadi tolak ukur yang digunakan sebagai tingkat kemakmuran suatu daerah atau wilayah dengan besaran barang dan jasa yang tersedia dibagi rata-rata penduduk daerah tersebut yang melakukan kegiatan konsumsi dan investasi.

Keberadaan indikator pertumbuhan ekonomi yang menggunakan produk domestik bruto (PDB) atau produk domestik bruto (PDB) belum tentu tepat karena tidak mencerminkan arti pertumbuhan yang sebenarnya. Indikator pendapatan per kapita juga dimaksudkan untuk memberikan penilaian pertumbuhan ekonomi yang lebih komprehensif, karena berfokus pada kemampuan suatu daerah dalam meningkatkan PDB dan juga menunjukkan pertumbuhan ekonomi, termasuk kemampuannya dalam meningkatkan kesejahteraan yang tercermin dalam laju pertumbuhan penduduk (Putrayuda *et al.*, 2017).

Sebenarnya, pertumbuhan ekonomi bergantung pada peningkatan output karena adanya penambahan penduduk. Namun, tidak dapat disangkal bahwa peningkatan penduduk dapat menyebabkan masalah baru seperti tingkat pengangguran yang tinggi karena persaingan yang semakin ketat di pasar kerja. Pendapatan per kapita menjadi indikator tambahan yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Indikator ini lebih komprehensif dalam mengukur pertumbuhan ekonomi karena lebih fokus pada kemampuan daerah

untuk meningkatkan PDRB lebih dari tingkat pertumbuhan penduduk. Kesejahteraan masyarakat berkorelasi positif dengan pendapatan perkapita.

Menurut penelitian Novita (2022) menyatakan peningkatan pendapatan penduduk disuatu daerah beriringan dengan meningkatnya pendapatan penduduk yang merangsang pertumbuhan ekonomi disuatu daerah dan berdampak pada pendapatan per kapita. Penelitian Suryatiningrum (2020) menyatakan peningkatan pendapatan per kapita juga mempengaruhi tingkat konsumsi dan produktivitas penduduk akan semakin meningkat. Pendapatan per kapita digunakan sebagai variabel terikat karena diduga mampu memicu pertumbuhan sektor-sektor ekonomi, investasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh sumber daya keuangan yang diterima oleh pemerintah daerah. Menurut (Suryatiningrum *et al.*, 2020) indikator laju pertumbuhan ekonomi menjadi gambaran pertumbuhan pendapatan per kapita yang positif dari tahun ke tahun, di mana peningkatan pendapatan akan meningkatkan taraf kesejahteraan dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Peningkatan aktivitas perekonomian akan menyumbang pendapatan daerah melalui setoran pajak, yang akan digunakan oleh daerah untuk memberikan pelayanan publik dan membangun sarana umum bagi masyarakat. Dilihat dari nilai PDRB dibagi jumlah penduduk disuatu daerah menghasilkan pendapatan per kapita daerah.

Dalam analisis pembangunan ekonomi, pendapatan perkapita juga berfungsi untuk menunjukkan perbedaan tingkat kemakmuran di berbagai negara. Dalam konteks ini, pendapatan rata-rata penduduk suatu wilayah

industri dianggap sebagai indikator tingkat kemakmuran wilayah industri tersebut. Dengan peningkatan pendapatan, daya beli penduduk meningkat, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Konsep pendapatan nasional yang biasa digunakan pemerintah untuk menghitung pendapatan per kapita adalah Produk Domestik Bruto (PDB/PDRB) atau Produk Nasional Bruto (PNB). Oleh karena itu, pendapatan per kapita dapat dihitung dengan menggunakan salah satu rumus berikut:

$$\text{Pendapatan Per Kapita} = \frac{\text{PDB/PDRB}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan daerah terdiri dari semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, adalah hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh daerah (Amami & Asmara, 2022).

Pendapatan Asli Daerah yang didefinisikan dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang dipungut oleh daerah sesuai dengan Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku. Pada kelompok pendapatan daerah, PAD adalah jenis pendapatan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainnya. Sebagai bagian dari desentralisasi, PAD memiliki tujuan untuk memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah.

Untuk meningkatkan PAD, daerah dilarang memberlakukan peraturan pendapatan daerah yang menimbulkan biaya ekonomi tinggi atau menghambat pergerakan penduduk, pergerakan barang dan jasa antar daerah, impor dan ekspor (UU Nomor 33 Tahun 2004). Sedangkan menurut pernyataan Halim (2004), pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah dan tujuannya adalah mengukur kemampuan daerah untuk menggali dana saat menerapkan otonomi daerah sebagai bentuk desentralisasi.

Halim (2007) menyatakan bahwa ada empat jenis pendapatan yang membentuk Pendapatan Asli Daerah:

1. Pajak Daerah.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah Kabupaten/Kota terdiri dari hotel, restoran, hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak bahan galian golongan C, pajak parkir, pajak lingkungan, pajak sarang walet, dan pajak air bawah tanah.

2. Retribusi Daerah

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009, jenis pendapatan retribusi Kabupaten/Kota terdiri dari 29 objek pendapatan, dan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi disebut sebagai retribusi daerah.

3. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan

Hal ini dapat dicapai dengan mengelola kekayaan daerah secara individu. Jenis pendapatan ini dikategorikan berdasarkan objek pendapatan seperti:

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD).
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara (BUMN).
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan swasta-swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. PAD lainnya yang sah.

Pendapatan ini berasal dari penerimaan daerah dari sumber lain yang dimiliki oleh Pemda, dibuat untuk mengawasi penerimaan dari daerah selain yang disebutkan di atas. Diantaranya objek pendapatan sebagai berikut:

1. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan;
2. Jasa giro;
3. Pendapatan bunga;
4. Penerimaan tuntutan ganti kerugian daerah.

Pemerintah daerah harus memiliki kemampuan untuk memaksimalkan potensi mereka untuk mencapai kemandirian. Menurut pernyataan (Widyasari, 2013) Pajak akan terus menjadi sumber pendapatan pemerintah daerah.

Indikator variabel pendapatan asli daerah ini dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{PAD} = \text{PPD} + \text{PRD} + \text{HPKDD} + \text{LPS}$$

Keterangan:

PAD : Pendapatan Asli Daerah

PPD : Pendapatan Pajak Daerah

PRD	: Pendapatan Retribusi Daerah
HPKDD	: Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
LPS	: Lain-lain PAD yang dipisahkan

2.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum merupakan jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terikat pada program belanja tertentu. Tujuan dana transfer ini adalah untuk menghilangkan disparitas anggaran dan pemerataan kapasitas anggaran antar daerah sehingga setiap daerah tidak menerima dana alokasi umum yang sama (Talangamin et al., 2019).

Daerah dengan pendapatan awal daerah yang lebih rendah memperoleh dana alokasi umum yang lebih tinggi, sebaliknya daerah dengan pendapatan awal daerah yang lebih tinggi memperoleh dana alokasi umum yang lebih rendah (Widyasari, 2013).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah sistem pembiayaan pemerintah yang terdiri dari pembagian sumber daya keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerataan keuangan antara daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan. Sistem ini mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan setiap daerah, dan seimbang dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan pemerintah. Menurut Sri Nawatmi (2006), dana perimbangan pemerintah daerah terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Dana

perimbangan bersumber dari dana yang terkumpul dari bagian hasil penerimaan PBB dan bea perolehan hak atas bumi dan bangunan.

Bersumber dari APBN Dana Alokasi Umum yang dialokasikan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah selama pelaksanaan desentralisasi, dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Tujuan dari DAU adalah untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah dengan menggunakan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi setiap daerah.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menetapkan bahwa:

1. DAU secara jumlah keseluruhan harus mewakili sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN;
2. Ayat 2 menyatakan celah fiskal dihitung dengan mengurangi kebutuhan fiskal daerah dengan kapasitas fiskal daerah;
3. Ayat 2 menyatakan pula alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Indikator variabel dana alokasi umum ini dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{DAU} = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

2.4 Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang memiliki manfaat lebih dari satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan menambah anggaran belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum (Adyatma & Oktaviani, 2019). Menurut Rarun (2019) Belanja modal mengacu pada

pengeluaran pemerintah untuk memproduksi barang modal tertentu. Belanja modal digunakan untuk pengadaan aset tetap pemerintah daerah: peralatan, bangunan, infrastruktur dan aset modal lainnya. Investasi mempunyai karakteristik unik yang berbeda dan pertimbangan dalam alokasinya ditunjukkan (Praza, 2016).

Perdirjen Perbendaharaan No. PER-33/PB/2008 tentang “Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal” menyatakan bahwa suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila:

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat, dan kapasitas.
2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Belanja modal menjadi Investasi yang dilakukan pemerintah daerah mencakup pengembangan dan peningkatan sektor pendidikan, kesehatan, dan transportasi sehingga masyarakat juga dapat memperoleh manfaat dari pembangunan daerah (Novianti, 2022). Ketersediaan infrastruktur yang lebih baik di berbagai sektor diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, meningkatkan produktivitas masyarakat, dan pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang mengatur mengenai belanja modal dalam 5 kategori utama:

1. Belanja modal tanah mengacu pada pengadaan, perolehan, penyelesaian, penggantian nama dan penyewaan tanah, pembukaan lahan, penyiapan tanah, penyiapan tanah, penyiapan sertifikat tanah, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perolehan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan harta benda biaya yang dikeluarkan untuk biaya administrasi lainnya yang berkaitan dengan akuisisi. Pembelian atau pembayaran ganti rugi atas real estat sampai properti tersebut dapat digunakan.
2. Belanja modal peralatan dan mesin merupakan keseluruhan biaya pembelian peralatan dan mesin yang digunakan dalam menjalankan suatu kegiatan sampai siap digunakan. Total biaya ini mencakup biaya penambahan, penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin, yang diharapkan dapat meningkatkan nilai aset, serta biaya-biaya tambahan yang diperlukan. Inventaris kantor selama 12 bulan, termasuk peralatan dan mesin siap pakai.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan, termasuk dalam belanja ini pengadaan atau penambahan atau penggantian merupakan jumlah biaya yang digunakan untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan kegiatan pembangunan gedung yang presentasinya mengikuti Keputusan Direktur Jendral Cipta Karya untuk pembangunan gedung dan bangunan.
4. Belanja modal untuk jalan, irigasi dan jaringan, yaitu penambahan, penggantian, perbaikan konstruksi, pembangunan sarana dan

prasarana yang melayani atau menjadi bagian dari jaringan irigasi (termasuk jaringan air minum), instalasi tenaga listrik atau jaringan distribusi, listrik komunikasi dan biaya jaringan lainnya; Ini bertindak sebagai infrastruktur dan sarana fisik distribusi atau instalasi.

5. Belanja modal tetap lainnya adalah biaya yang dikeluarkan untuk perolehan atau pembangunan belanja modal tetap lainnya di luar perkiraan belanja modal untuk tanah, pabrik dan mesin, bangunan dan struktur, jaringan (jalan dan irigasi) dan belanja non-materi. Belanja modal dapat diperhitungkan. Belanja modal tak berwujud ini meliputi penyewaan, pengadaan, atau pembelian barang seni, barang antik, koleksi museum, peternakan, buku, dan jurnal ilmiah.

Indikator variabel belanja modal ini dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan} + \text{belanja Aset Lainnya}$$

2.5 Kajian Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
Kajian Penelitian Terdahulu

NO	SUMBER	VARIABEL INDEPENDEN	VARIABEL DEPENDEN	HASIL
1.	Imelda Rimenda Purba dan Vivin Tri Indawati Gulo. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Nias Barat Periode 2016-2021	X ₁ : Pendapatan Asli Daerah X ₂ : Dana Alokasi Umum	Y : Belanja Modal	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel PAD tidak berpengaruh terhadap variabel belanja modal pada Belanja Modal (Hipotesis ditolak) • Variabel DAU tidak berpengaruh terhadap variabel belanja modal (Hipotesis ditolak) • PAD dan DAU secara simultan tidak berpengaruh terhadap belanja modal
2.	Erina Setiana Putri dan Nur Ika Mauliyah. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kab/Kota di Jawa Timur Periode 2018-2020)	X ₁ : Pertumbuhan Ekonomi X ₂ : Pendapatan Asli Daerah X ₃ : Dana Alokasi Umum X ₄ : Dana Alokasi Khusus	Y : Belanja Modal	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal (Hipotesis diterima) • variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal (Hipotesis diterima) • Variabel dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal (Hipotesis diterima) • Variabel dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal (Hipotesis diterima)

3.	Dian Yustriawan. (2021). Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan Per Kapita Melalui Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.	X ₁ : Dana Perimbangan	Y : Pendapatan Per Kapita Dan Variabel Intervening Z : Belanja Modal	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil) berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. • Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap pendapatan per kapita. • Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan per kapita melalui belanja modal sebagai variabel intervening.
4.	Herlina Novita, Anita Yuli Sari Akbar Purba, Erika Sri Dwina Br Perangin-Angin, Engie Aurel Caroline, Julius Kristofan Zai. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU dan DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal di Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara Tahun 2018-2020	X ₁ : Pertumbuhan Ekonomi X ₂ : Pendapatan Asli Daerah X ₃ : Dana Alokasi Umum X ₄ : Dana Alokasi Khusus	Y : Belanja Modal	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh dan tidak signifikan secara statistik terhadap Belanja Modal pada Kota/Kabupaten Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Hipotesis ditolak) • Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan substantial terhadap Belanja Modal pada Kota/Kabupaten Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Hipotesis diterima) • Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Hipotesis ditolak) • Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan substansial terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi

				Sumatera Utara (Hipotesis diterima) <ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan berpengaruh positif dan substansial terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Hipotesis diterima)
5.	Desak Made Mya Yudia Sari dan Dewa Gede Wirama. (2020). Pengaruh PAD, DAU Dan DAK Pada Alokasi Belanja Modal dengan Pendapatan Per Kapita Sebagai Pemoderasi	X ₁ : Pendapatan Asli Daerah X ₂ : Dana Alokasi Umum X ₃ : Dana Alokasi Khusus	Y : Belanja Modal Variabel Pemoderasi : Pendapatan Per Kapita	<ul style="list-style-type: none"> • PAD dan DAU berpengaruh positif pada alokasi belanja modal • DAK tidak berpengaruh pada alokasi belanja modal • Pendapatan Per Kapita tidak memoderasi PAD, DAU, dan DAK pada alokasi belanja modal
6.	Ade Onny Siagian. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Transfer Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal	X ₁ : Pendapatan Asli Daerah X ₂ : Dana Transfer	Y : Belanja Modal	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di DIY (Hipotesis diterima) • Dana Transfer memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian belanja modal di DIY (Hipotesis diterima)
7.	Heriston Sianturi dan Anastasya Astrid Eka Putri. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana	X ₁ : Pendapatan Asli Daerah X ₂ : Dana Alokasi Umum X ₃ : Dana Alokasi Khusus	Y : Belanja Modal	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Hipotesis diterima) • Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan

	Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Banten)			<p>signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Hipotesis diterima)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Hipotesis ditolak) • Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Hipotesis diterima)
8.	Riza Amami dan Kiki Asmara. (2022). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan BM terhadap Kemiskinan di Kabupaten Ngawi	X_1 : Pendapatan Asli Daerah X_2 : Dana Alokasi Umum X_3 : Dana Alokasi Khusus X_4 : Belanja Modal	Y : Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> • PAD tidak berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Ngawi tahun 2006 – 2020 (Hipotesis ditolak) • DAU memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Ngawi tahun 2006 – 2020 (Hipotesis diterima) • DAK tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Ngawi tahun 2006 – 2020 (Hipotesis ditolak) • Belanja modal tidak berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Ngawi tahun 2006 – 2020 (Hipotesis ditolak)
9.	Hanum Indrianingrum	X_1 : Pendapatan Asli Daerah	Y : Kemandirian Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh

	dan Nuwun Priyono. (2023). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah Di Kabupaten Magelang Pada Tahun 2006 – 2021	X ₂ : Dana Alokasi Umum X ₃ : Dana Alokasi Khusus X ₄ : Dana Bagi Hasil		positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian Kabupaten Magelang (Hipotesis diterima) <ul style="list-style-type: none"> • Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh positif maupun signifikan terhadap kemandirian Kabupaten Magelang (Hipotesis ditolak) • Dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian Kabupaten Magelang (Hipotesis diterima) • Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah Kabupaten Magelang (Hipotesis diterima)
10.	Saifulloh Wisnu Romadhon dan Tony Seno Aji. (2021). Pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	X ₁ : Pendapatan Asli Daerah X ₂ : Dana Alokasi Umum X ₃ : Dana Alokasi Khusus	Y : Belanja Modal	<ul style="list-style-type: none"> • PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah (Hipotesis diterima) • DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah (Hipotesis diterima) • DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah (Hipotesis diterima)
11.	Citra Etika, Rachmania, dan Meti Elisa Pitri. (2022). Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah	X ₁ : Belanja Modal X ₂ : Pendapatan Asli Daerah	Y : Pertumbuhan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Hipotesis diterima)

	Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Lampung			<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (Hipotesis ditolak) • Belanja modal dan pendapatan asli daerah secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Hipotesis diterima)
12.	Yuli Tri Cahyono dan Agnes Kumalasari. (2021). Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Per Kapita (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Surakarta Tahun 2013-2019)	X_1 : Belanja Modal X_2 : Pendapatan Asli Daerah X_3 : Jumlah Penduduk	Y : Pendapatan Per Kapita	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja modal berpengaruh (secara statistik signifikan) terhadap pendapatan per kapita di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Surakarta tahun 2013-2019 (Hipotesis diterima) • PAD berpengaruh (secara statistik signifikan) terhadap pendapatan per kapita di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Surakarta tahun 2013-2019 (Hipotesis diterima) • Jumlah penduduk berpengaruh (secara statistik signifikan) terhadap pendapatan per kapita di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Surakarta tahun 2013-2019 (Hipotesis diterima)
13.	Defresto Risman Tamu Ama dan Yuniarti Reny Renggo. (2022). Pengaruh PAD dan Belanja Modal Terhadap PDRB Kabupaten di Pulau Sumba Tahun 2015 – 2020	X_1 : Pendapatan Asli Daerah X_2 : Belanja Modal	Y : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	<ul style="list-style-type: none"> • PAD berpengaruh positif tidak signifikan terhadap PDRB (Hipotesis ditolak) • Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB (Hipotesis diterima)

14.	Parassela Pangestu P, Meutia Riany, Elisabeth Paramita J.S, Endah Sundaning K. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Se- Provinsi Jambi 2009-2017	X ₁ : Pendapatan Asli Daerah X ₂ : Dana Alokasi Umum	Y : Belanja Modal	<ul style="list-style-type: none"> • PAD tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal (Hipotesis di tolak) • DAU memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal (Hipotesis diterima) • PAD dan DAU secara simultan berpengaruh signifikan terhadap alokasi Belanja Modal.
15.	Puguh Setiawan, Rina Widiyanti, Liesma Maywarni Siregar, Nurhaida, Elmi Oktavia. (2021). Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2010-2016	X ₁ : Pendapatan Asli Daerah X ₂ : Dana Alokasi Umum X ₃ : Dana Alokasi Khusus	Y : Kemandirian Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah pada Provinsi di Pulau Sumatera (Hipotesis diterima) • Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah pada provinsi di Pulau Sumatera (Hipotesis ditolak) • Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah pada provinsi di Pulau Sumatera (Hipotesis ditolak)
16.	Satmaka Srasa Saswatata dan Parju. (2022) Pengaruh PAD,	X ₁ : Pendapatan Asli Daerah X ₂ : Dana Alokasi Umum	Y : Indeks Pembangunan Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Hipotesis diterima)

	DAU, dan DAK Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Semarang	X ₃ : Dana Alokasi Khusus		<ul style="list-style-type: none"> • DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Hipotesis diterima) • DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Hipotesis diterima)
--	---	--------------------------------------	--	--

Sumber: Disarikan dari berbagai jurnal untuk penelitian ini, 2024

2.6 Pengaruh antar Variabel dan Pengembangan Hipotesis

1) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Per Kapita

Desentralisasi fiskal menjadi salah satu tujuan utama terciptanya kemandirian suatu daerah. Menurut pernyataan Novita (2022) Pemerintah daerah diharapkan mampu memanfaatkan potensi sumber daya fiskal daerah, khususnya melalui pendapatan asli daerah (PAD). Daerah yang tingkat pertumbuhan PADnya positif berarti berpotensi meningkatkan pendapatan per kapitanya. Penelitian D. M. M. Y. Sari & Wirama (2018) menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dengan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Penelitian P. Sari (2017) menegaskan pula bahwa meningkatnya PAD merupakan salah satu sumber pembelanjaan pemerintah daerah. Peningkatan penerimaan PAD akan berdampak pada dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah serta tingkat kemandirian daerah akan juga mengalami peningkatan. Akibatnya, pemerintah daerah akan berusaha untuk lebih mengeksplorasi potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan PAD yang berkelanjutan juga akan menghasilkan peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Peningkatan PAD tentu akan berdampak pada perekonomian daerah. Oleh karena itu, jika pendapatan PAD meningkat namun tidak terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan maka daerah tidak akan berhasil. Di sisi lain, PAD dinilai terlalu mengeksploitasi masyarakat tanpa mempertimbangkan peningkatan produktivitas masyarakat itu sendiri (Dalil *et al.*, 2020). Kesuksesan meningkatkan PAD tidak hanya ditentukan oleh jumlah yang diterima, tetapi juga oleh fungsinya untuk mengatur perekonomian lokal dan efek yang ditimbulkannya pada kesejahteraan masyarakat lokal (Imanulloh & Purwanti, 2017). Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H1: Diduga Pendapatan Asli Daerah dapat mempengaruhi Pendapatan Per Kapita.

2) Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Per Kapita

Selain PAD, DAU adalah pendapatan daerah yang ditransfer dari APBN yang diberikan oleh pemerintah pusat. DAU diberikan dengan tujuan meratanya dana daerah untuk membiayai program khusus yang dikeluarkan selama pelaksanaan desentralisasi (Novita *et al.*, 2022).

Dengan bantuan sumber pendanaan dari pemerintah pusat, pemerintah, terutama sektor publik, diharapkan dapat mengalokasikan dana tersebut dengan bijak. Dana alokasi umum berdampak positif pada pendapatan per kapita karena peningkatan infrastruktur dan fasilitas publik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (Juliansyah &

Nurbayan, 2018). Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H2: Diduga Dana Alokasi Umum dapat mempengaruhi Pendapatan Per Kapita.

3) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Menurut Adyatma & Oktaviani (2019) "Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diterima oleh daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah." Belanja modal adalah pengeluaran yang dibuat dalam anggaran untuk membeli aset tetap, tanah, bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud (Romadhon & Aji, 2021). Dalam konteks Pendapatan Asli Daerah, hubungan kontraktual antara agen (masyarakat) dan prinsipal (pemerintah) dapat dilihat dari kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi belanja modal, yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai yang dibiayai dari belanja modal yang dianggarkan setiap tahun.

Sedangkan belanja modal itu sendiri adalah sendi dari hubungan antara agen dan prinsipal. Oleh karena itu, ada hubungan antara Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah. Namun, tidak semua wilayah dengan pendapatan tinggi juga memiliki pertumbuhan ekonomi yang cepat. Studi yang dilakukan oleh Amami & Asmara (2022); Riviando (2019) dan

Marliana (2022) menemukan bukti empiris bahwa Belanja Modal dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah. Hasil ini dapat menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam menentukan jumlah belanja modal yang dialokasikan.

Ini sesuai dengan PP No 58 tahun 2005, yang menetapkan bahwa APBD harus disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan. Jika pemerintah daerah ingin meningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, mereka harus menggali Pendapatan Asli Daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal berkorelasi positif dengan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H3: Diduga Pendapatan Asli Daerah dapat mempengaruhi Belanja Modal

4) Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Menurut Wahidmurni (2017) proporsi dana alokasi umum terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibandingkan dengan penerimaan daerah lain, termasuk pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling besar 20% (Setiawan et al., 2021).

Dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, yang digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

(UU Nomor 33 Tahun 2004). Menurut Romadhon & Aji (2021), pemerintah daerah dapat menggunakan dan perimbangan keuangan dana alokasi daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik pelaksanaannya melalui belanja modal.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya sudah dilakukan oleh Prasetyo & Rusdi (2021) menyatakan bahwa alokasi dana umum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Penelitian tersebut juga diperkuat dengan penelitian Hassan (2016) dan Sudika & Budiarta (2017) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H4: Diduga Dana Alokasi Umum dapat mempengaruhi Belanja Modal

5) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Per Kapita Melalui Belanja Modal

Peningkatan PAD harus berdampak pada perekonomian daerah (Saragih, 2018). Akibatnya, daerah tidak akan berhasil jika tidak mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, meskipun penerimaan PAD meningkat. Sebaliknya, eksploitasi PAD terlalu banyak terhadap masyarakat tanpa mempertimbangkan peningkatan produktifitas masyarakat itu sendiri. D. M. M. Y. Sari & Wirama (2018) menyatakan bahwa peningkatan PAD harus dinilai tidak hanya dari jumlah uang yang diterima, tetapi juga dari bagaimana hal itu mengatur perekonomian

masyarakat agar dapat berkembang, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Meningkatnya PAD suatu daerah akan berdampak pada peningkatan belanja modal. Peningkatan belanja modal juga akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan per kapita penduduk. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H5: Diduga Pendapatan Asli Daerah dapat mempengaruhi Pendapatan Per Kapita Melalui Belanja Modal

6) Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Per Kapita Melalui Belanja Modal

Belanja desentralisasi dibiayai oleh dana alokasi umum (DAU), dana APBN yang diberikan kepada daerah dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan. Dengan desentralisasi fiskal, pemerintah pusat berharap pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya mereka dengan lebih baik dan tidak terlalu bergantung pada Departemen Pertanian dan Pembangunan Pedesaan (DAU). Dengan mengalihkan DAU dari pemerintah pusat, daerah akan memiliki lebih banyak uang untuk menggunakan PAD untuk mendukung inisiatif permodalan, yang akan membantu meningkatkan pelayanan publik pemerintah dan meningkatkan pendapatan per kapita (Novita et al., 2022).

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang dialokasikan pemerintah pusat ke daerah-daerah untuk membiayai belanja modal dan

belanja tidak langsung lainnya. Apabila DAU dapat dikelola dengan baik oleh suatu daerah dan pengalokasian yang tepat dengan digunakan secara efisien untuk belanja modal, maka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut (Siswiyanti, 2017). Oleh karena itu, peningkatan pertumbuhan ekonomi mampu berdampak positif terhadap Pendapatan Per Kapita penduduk daerah setempat. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H6: Diduga Dana Alokasi Umum dapat mempengaruhi Pendapatan Per Kapita Melalui Belanja Modal.

7) Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pendapatan Per Kapita

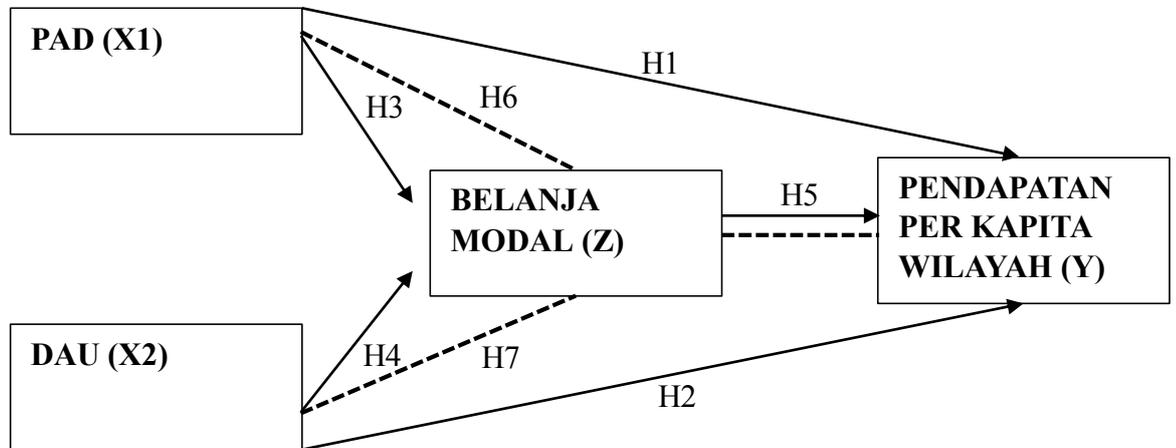
Belanja modal adalah belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membangun dan memperbaiki bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi sehingga masyarakat umum juga mendapat manfaat dari pembangunan. Diharapkan bahwa ketersediaan infrastruktur yang baik akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang. Peningkatan produktivitas masyarakat diharapkan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar (Rahmadhani, 2019).

Belanja modal digunakan untuk sektor-sektor yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Alokasi belanja modal tersebut digunakan untuk pengembangan infrastruktur yang dapat mendorong perekonomian, sehingga tingkat produktifitas masyarakat meningkat. Dengan meningkatnya produktifitas masyarakat, maka berdampak meningkatkan pendapatan masyarakat yang tercermin dalam pendapatan

per kapita (Cahyono & Kumalasari, 2021). Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H7: Diduga Belanja Modal dapat mempengaruhi Pendapatan Per Kapita.

2.7 Model Empiris Penelitian



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat peneliti, maka pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif, dimana data berwujud dalam bentuk angka, skor, dan statistik dalam pengumpulan serta analisis data yang dapat diukur. Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan sistematis dengan data berupa angka dan hasil penelitian objektif (Indrianingrum & Priyono, 2023). Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder.

3.2 Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut Arikunto (2006) Populasi penelitian merupakan total seluruh obyek pada penelitian. Penelitian ini memiliki populasi bersumber pada dokumen Laporan Realisasi APBD Pemerintah Daerah pada Wilayah Industri yaitu Cikarang, Semarang, Surabaya, Gresik, dan Batam.

3.2.2 Sampel

Menurut Arikunto (2006) Sampel penelitian yang artinya mewakili populasi yang diteliti. Sampel penelitian ini 40 data yang diambil adalah keseluruhan populasi, yaitu Cikarang, Semarang, Surabaya, Gresik dan Batam dari tahun 2015-2022. Data penelitian yang dianalisis adalah data sekunder, bersumber dari dokumen

Laporan Realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui internet. Dari Laporan Realisasi APBD diperoleh data mengenai jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) serta Pendapatan per kapita wilayah terinci di situs Badan Pusat Statistik melalui internet.

3.2.3 Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini digunakan teknik *total sampling* yang artinya adalah suatu teknik dimana seluruh populasi yang ada dapat dijadikan sampel. Menurut Ley (2002) Teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi.

3.3 Pengembangan Pengukuran Variabel Penelitian

Tabel 3. 1
Definisi Operasional dan Pengukuran

No	Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran	Sumber
1.	Pendapatan Per Kapita	Pendapatan per kapita, juga dikenal sebagai PDRB per kapita merupakan total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi di wilayah (regional) dalam kurun waktu tertentu.	Pendapatan per kapita ini menjadi salah satu cara mengukur kesejahteraan suatu daerah yang diukur dari pendapatan rata-rata suatu daerah dibagi jumlah penduduk. $\text{Pendapatan Per Kapita} = \frac{\text{PDB/PDRB}}{\text{Jumlah Penduduk}}$	Luh Dita Darmayanti dan Surya Dewi Rustariyuni (2019)
2.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	PAD merupakan dana yang masuk ke kas daerah bersumber dari pajak, dana transfer, dan beberapa	Pengukuran PAD total menjadi tolak ukur tiap Kabupaten/Kota yang diperoleh dari data Laporan Realisasi	Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

		pendapatan retribusi daerah lainnya.	Anggaran dalam pos-pos pendapatan. PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain PAD yang Sah.	
3.	Dana Alokasi Umum (DAU)	DAU merupakan dana yang diperoleh dari APBD serta didistribusikan ke daerah sehingga memiliki kemampuan keuangan yang sama untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.	Proses konsep alokasi dasar digunakan untuk menentukan jumlah dana alokasi umum yang diperlukan untuk setiap daerah. Celah fiskal dihitung dari kebutuhan fiskal dikurangi kapasitas fiskal daerah. DAU = Celah Fiskal + Alokasi Dasar.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
4.	Belanja Modal	Belanja modal Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan + belanja Aset Lainnya. merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.	Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan + belanja Aset Lainnya.	Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Sumber: Diadopsi dari Penelitian Terdahulu untuk Studi ini, 2024

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Arikunto (2006) menyatakan dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang bersumber pada barang-barang secara tertulis. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi yaitu mengumpulkan data sekunder dari Laporan Realisasi APBD dan Pendapatan Per Kapita Pemerintah Kabupaten/Kota di beberapa wilayah industri yang diperoleh dari situs Badan Pusat Statistik dan Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2015-2022 melalui internet serta menggunakan metode studi pustaka. Studi pustaka yaitu metode yang dilakukan dengan mencari dan membaca buku-buku yang berisi informasi, kemudian dicatat dan dipelajari untuk dijadikan data tambahan.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah metode pengolahan dan interpretasi data yang telah dikumpulkan. Hasil pengolahan data ini akan digunakan untuk menjawab masalah yang telah dibuat dan untuk mengukur pengaruh variabel X terhadap variabel Y melalui Z. Menganalisis data memerlukan suatu metode atau teknik menganalisis data hasil penelitian agar laporan yang dihasilkan dapat diinterpretasikan dengan mudah untuk dipahami. Analisis data dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bagian yaitu analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis jalur (*path analysis*), uji hipotesis, dan Uji Sobel (*Sobel Test*) dengan menggunakan alat bantu perangkat lunak SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*).

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut penelitian Heriston Sianturi & Anastasya Astrid Eka Putri (2018) menyatakan bahwa analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi data. Analisis ini mencakup rata-rata (mean), standar deviasi, varian, nilai maksimum dan minimum, total, rentang, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi). Variabel penelitian ini termasuk variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), variabel Dana Alokasi Umum (DAU), variabel Pendapatan Per Kapita, dan variabel Belanja Modal. Analisis ini digunakan untuk memberikan penjelasan atau penjelasan tentang variabel-variabel ini.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Menurut Ghozali (2006) menyatakan bahwa penelitian ini menguji asumsi klasik yang terikat pada persamaan model regresi, dengan demikian data yang digunakan untuk menguji hipotesis tidak terpengaruh oleh asumsi klasik.

1) Uji Normalitas.

Menurut penelitian Ahmad (2017) uji normalitas memiliki tujuan untuk melakukan pengujian model regresi, variabel pengganggu, dan nilai residual memiliki distribusi normal atau tidak dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini untuk melakukan uji normalitas menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) adalah salah satu cara

untuk mengetahui apakah residual berdistribusi normal. Agar data dianggap terdistribusi normal, hasil uji K-S harus memberikan nilai probabilitas atau nilai *asympt sig. (2-tailed)* di atas $\alpha=0,05$.

2) Uji Multikolinearitas

Tujuan uji multikolinearitas, menurut Ghozali (2006) adalah untuk mengetahui apakah model regresi menunjukkan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*). Model regresi yang baik seharusnya tidak menunjukkan adanya korelasi.

Nilai *tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* dapat digunakan untuk mengidentifikasi multikolinearitas. Melalui program SPSS digunakan untuk menguji multikolinearitas dalam penelitian ini.

- Apabila nilai $VIF < 10,00$ atau nilai *tolerance* $> 0,10$, maka model regresi yang dihasilkan tidak menunjukkan multikolinearitas dan dapat digunakan.
- Apabila $VIF > 10,00$ atau nilai *tolerance* $< 0,10$, maka menunjukkan gejala multikolinearitas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk menentukan apakah homokedastisitas atau heteroskedastisitas terjadi dalam model regresi. Dalam kasus di mana ketidaksamaan *varians* residual dari suatu peristiwa, maka tetap homokedastisitas dan

jika *varians* berbeda uji ini menunjukkan bahwa heteroskedastisitas terjadi. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan mengamati pola *scatter plot* yang dibuat dengan menggunakan program SPSS dan uji glejser. Jika variabel dependen dipengaruhi secara statistik oleh variabel independen, maka indikasi terjadi heteroskedastisitas. Agar dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas, hasil tampilan output SPSS akan menunjukkan bahwa probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%.

4) Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah ketika variabel gangguan pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel gangguan pada periode lain. Dengan kata lain, autokorelasi terjadi ketika variabel sampel tidak dapat menggambarkan variabel populasi (Heliyanto & Handayani, 2016). Tujuan dari uji autokorelasi adalah untuk mengetahui apakah ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dan periode $t-1$ (sebelumnya) dalam regresi linier. Jika ada korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Regresi yang bebas dari autokorelasi adalah model regresi yang baik. Menurut Ahmad (2017) nilai statistik Durbin Watson (D-W test) digunakan untuk mengetahui apakah ada autokorelasi

dalam model regresi. Pengambilan keputusan apakah terdapat gejala autokorelasi atau tidak diantaranya:

- Apabila nilai DW dibawah -2 atau $DW < -2$ maka terjadi autokorelasi positif
- Apabila nilai DW diatas +2 atau $DW > +2$ maka terjadi autokorelasi negatif
- Apabila nilai DW berada diantara -2 dan +2 maka tidak terjadi autokorelasi.

3.5.3 Analisis Jalur

Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi berganda. Analisis jalur digunakan jika terdapat variabel mediasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis jalur.

1) Uji Regresi Linier Berganda

Tujuan pengujian hipotesis, menurut Novianti (2022) adalah untuk menentukan kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi linier berganda. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Per Kapita

Z = Belanja Modal

- α = Konstanta
 β = Slope atau koefisien regresi atau intersep
 X_1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 X_2 = Dana Alokasi Umum (DAU)
 e = Error

Model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji pengaruh langsung variabel bebas terhadap variabel intervening ialah:

$$BM = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + e \dots \dots \dots (1)$$

Untuk menguji pengaruh langsung variabel bebas dan variabel intervening terhadap variabel terikat, menggunakan model persamaan regresi yaitu sebagai berikut:

$$PP = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 BM + e \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

PP = Pendapatan Per Kapita

BM = Belanja Modal

3.5.4 Pengujian Hipotesis

Nilai statistik t, nilai statistik F, dan koefisien determinasinya dapat digunakan untuk menentukan ketepatan fungsi regresi sample dalam menaksir aktual. Nilai uji statistik berada dalam daerah kritis (daerah H_0 ditolak). Jika nilai uji statistik berada dalam daerah dimana

Ho diterima, perhitungan statistik tersebut dianggap signifikan secara statistik. Berikut adalah metode yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini:

1) Uji t (Uji Parsial)

Pada dasarnya, uji statistik t menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual terhadap penjelasan variasi variabel dependen. Pengujian hipotesis dilakukan dengan program SPSS, yaitu dengan membandingkan perhitungan signifikansi hitung masing-masing variabel bebas terhadap variabel bebas terhadap variabel $\alpha = 5\%$. Jika perhitungan signifikansi hitung kurang dari α (5%), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan kata lain, variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen.

2) Uji F (Uji Simultan)

Pada dasarnya, uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel bebas dalam model mempengaruhi variabel terikat atau dependen secara bersamaan (Ghozali, 2006). Pengujian hipotesis (Uji F), yang dilakukan dengan program SPSS, diberi nama "uji F" karena mengikuti distribusi F, yang memiliki kriteria seperti *One Way Anova*.

Hasil uji F dapat dilihat pada tabel anova, yaitu:

- Jika nilai probabilitas $F_{hitung} \leq$ dari 0,05, maka dikatakan layak.
- Jika nilai probabilitas $F_{hitung} >$ dari 0,05, maka dikatakan tidak layak.

3) Koefisien Determinasi (R^2)

Uji regresi linier berganda menganalisis pula besarnya koefisien regresi (R^2) keseluruhan. R digunakan untuk mengukur ketepatan yang paling baik dari analisis regresi berganda. R^2 mendekati 1 maka dapat dikatakan semakin kuat kemampuan variabel bebas dalam model regresi tersebut untuk menerangkan variabel terikatnya. Sebaliknya, jika R^2 mendekati 0 maka semakin lemah kemampuan variabel bebas dalam model regresi tersebut untuk menerangkan variabel terikatnya. Jika nilai dari suatu variabel diatas 0,5, berarti variabel independen dapat memberikan gambaran variabel dependen dengan baik.

3.5.5 Uji Sobel

Sobel test merupakan uji untuk mengetahui apakah hubungan yang melalui sebuah variabel mediasi secara signifikan mampu sebagai mediator dalam hubungan tersebut (Basuki, 2021). Untuk mengetahui pengaruh X_1 terhadap Z melalui Y , serta pengaruh X_2 terhadap Z melalui Y akan digunakan konsep uji sobel (Sobel test).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Pengumpulan Data di Lapangan

Berdasarkan populasi dalam penelitian ini berupa data sekunder bersumber pada Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah dari tahun anggaran 2015 sampai 2022 melalui situs <https://www.bps.go.id/id> dan situs <https://djpk.kemenkeu.go.id/>. Berdasarkan teknik *total sampling*, dengan kriteria sampel yang telah ditentukan diperoleh sampel yang dijadikan obyek penelitian sebanyak 40 dari 5 Kabupaten/Kota pada wilayah industri tahun 2015-2022. Wilayah yang diteliti yaitu Wilayah Industri yang terdiri dari:

Tabel 4. 1
Wilayah Industri

No	Wilayah Industri (Kabupaten/Kota)
1.	Kabupaten Bekasi (Cikarang)
2.	Kota Semarang
3.	Kota Surabaya
4.	Kabupaten Gresik
5.	Kota Batam

Data yang peneliti dapatkan dari BPS adalah data berisi PDRB dibagi Jumlah Penduduk mulai tahun 2015-2022 pada wilayah industri masing-masing untuk memperoleh hasil data Pendapatan Per Kapita Pemerintah

Kabupaten/Kota. Sedangkan data yang peneliti dapatkan dari DJPK adalah Laporan Realisasi APBD yaitu data keuangan daerah realisasi APBD tahun anggaran 2015-2022 berisi data Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal serta data keuangan daerah realisasi TKDD tahun anggaran 2015-2022 berisi data Dana Alokasi Umum (DAU). Berikut rincian data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Perkapita, dan Belanja Modal Wilayah Industri Periode 2015-2022 yang diteliti yaitu:

Tabel 4. 2 Data PAD, DAU, Pendapatan Per Kapita, dan Belanja Modal
Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Cikarang
Tahun 2015-2022

Tahun	PAD	DAU	Pendapatan Per Kapita	Belanja Modal
2015	1.843.836.910.285	1.256.103.775.000	63.447.186	1.165.153.095.189
2016	1.917.814.673.704	1.173.508.044.000	64.041.563	1.302.248.458.477
2017	2.311.805.849.243	1.152.893.281.000	65.200.599	971.090.629.160
2018	2.094.369.342.687	1.152.893.281.000	66.636.072	853.621.639.952
2019	2.439.368.558.406	1.219.550.987.000	68.158.232	954.900.806.872
2020	2.384.139.484.622	1.105.266.422.000	78.344.761	670.123.926.245
2021	2.543.999.745.764	1.096.895.278.000	79.728.166	726.057.096.351
2022	2.537.931.758.052	1.097.123.037.000	82.472.179	745.404.155.756

Sumber: Data APBD Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah

Tabel 4. 3 Data PAD, DAU, Pendapatan Per Kapita, dan Belanja Modal
Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang
Tahun 2015-2022

Tahun	PAD	DAU	Pendapatan Per Kapita	Belanja Modal
2015	1.201.581.778.459	1.126.847.634.000	64.145.026	726.139.722.089
2016	1.491.645.900.065	1.211.708.204.000	66.826.235	1.026.716.904.816
2017	1.791.886.378.674	1.190.422.387.000	70.125.080	1.275.359.088.966
2018	1.821.274.103.250	1.190.422.387.000	73.497.403	1.228.459.434.270
2019	2.066.333.418.588	1.317.186.595.000	77.629.854	1.054.761.429.772
2020	2.024.537.808.307	1.183.614.821.000	83.294.176	506.420.330.795
2021	2.385.944.758.477	1.167.622.970.000	87.381.987	953.669.847.702
2022	2.545.991.747.658	1.167.622.970.000	92.223.854	1.048.844.590.189

Sumber: Data APBD Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah

Tabel 4. 4 Data PAD, DAU, Pendapatan Per Kapita, dan Belanja Modal
Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya
Tahun 2018-2022

Tahun	PAD	DAU	Pendapatan Per Kapita	Belanja Modal
2015	4.035.649.478.398	1.147.385.486.000	113.799.638	1.785.125.255.500
2016	4.090.206.769.388	1.233.380.404.000	120.074.283	1.789.394.044.827
2017	5.161.844.571.172	1.211.713.876.000	126.857.328	2.517.891.658.246
2018	4.972.890.868.136	1.211.713.876.000	134.200.949	2.430.061.039.309
2019	5.381.920.253.810	1.254.344.402.000	141.829.240	2.754.304.824.082
2020	4.289.960.292.366	1.203.461.956.000	136.072.544	1.583.663.159.605
2021	4.727.280.629.670	1.182.439.723.000	141.571.468	1.016.336.503.390
2022	5.314.695.257.794	1.182.439.723.000	150.422.009	1.766.030.466.528

Sumber: Data APBD Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah

Tabel 4. 5 Data PAD, DAU, Pendapatan Per Kapita, dan Belanja Modal
Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik
Tahun 2015-2022

Tahun	PAD	DAU	Pendapatan Per Kapita	Belanja Modal
2015	799.884.870.103	873.265.959.000	64.793.343	584.223.675.905
2016	715.480.938.191	923.469.024.000	67.545.326	413.339.658.373
2017	871.564.498.248	907.246.643.000	70.704.747	422.641.766.003
2018	957.255.706.269	909.888.092.000	74.004.318	369.883.330.557
2019	980.776.381.995	958.325.036.000	77.128.272	538.046.525.562
2020	924.657.913.563	871.987.860.000	74.630.428	281.697.688.881
2021	1.031.387.734.238	870.446.047.000	76.698.478	298.579.850.431
2022	1.191.799.202.154	870.446.047.000	81.618.064	310.157.730.143

Sumber: Data APBD Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah

Tabel 4. 6 Data PAD, DAU, Pendapatan Per Kapita, dan Belanja Modal
Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam
Tahun 2015-2022

Tahun	PAD	DAU	Pendapatan Per Kapita	Belanja Modal
2015	836.713.858.342	529.988.410.000	76.142.878	524.332.531.768
2016	881.268.969.157	576.930.711.000	77.159.951	524.463.723.680
2017	974.124.203.684	577.144.597.000	76.276.352	556.926.371.276
2018	1.084.640.559.853	599.074.016.000	77.232.030	613.438.215.481
2019	1.147.685.950.193	659.164.959.000	76.566.045	655.137.393.960
2020	975.283.123.576	629.854.829.000	88.951.048	309.463.968.545
2021	1.094.019.332.634	626.199.396.000	90.299.959	613.293.295.305
2022	1.282.185.392.071	627.464.615.000	93.510.803	646.111.854.046

Sumber: Data APBD Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah

4.2 Deskripsi Umum Objek Tempat Penelitian

Berdasarkan objek tempat penelitian yaitu lima wilayah industri yang akan diteliti:

4.2.1 Kabupaten Bekasi

Kabupaten Bekasi memiliki luas wilayah seluas 127.388 ha. Wilayah Kabupaten Bekasi, terdiri dari 4 kewedanaan, 13 kecamatan (termasuk Kecamatan Cibarusah) dan 95 desa. Kabupaten Bekasi sebagai daerah yang berbasis industri. Cikarang Selatan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bekasi yang sangat cepat perkembangannya. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kawasan industri berskala nasional lebih dari 2000 pabrik dan kota mandiri yang berada di dalam maupun di sekitar kecamatan ini, di antaranya adalah kawasan industri MM2100, Jababeka, Delta Silicon, EJIP, BIIE dan Kawasan industri di Kota Delta Mas yang berada di bawah grup Lippo yang berasal dari berbagai negara. Kecamatan Cikarang Selatan juga menyumbang industri migas di Kabupaten Bekasi dengan beroperasinya tiga sumur gas yaitu Jatirarongan 1, 2 dan 3.

Perkembangan perekonomian Kabupaten Bekasi, yang diukur dengan beberapa indikator ekonomi salah satunya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bekasi cukup memberikan harapan terhadap peluang berinvestasi maupun memberikan dampak nilai tambah ekonomi terhadap masyarakat. Ini

tercermin dari laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bekasi mengalami peningkatan setiap tahunnya.

4.2.2 Kota Semarang

Kota Semarang memiliki luas wilayah Kota Semarang tercatat 373,70 Km². Berdasarkan morfologinya, wilayah Kota Semarang secara umum dapat dibagi menjadi dua (2) bagian, yaitu Kota Semarang Bawah yang merupakan dataran rendah, dan Kota Semarang Atas yang merupakan dataran tinggi (perbukitan). Secara administratif, Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah kecamatan dan 177 kelurahan. Kota Semarang menjadi wilayah industri yang menjanjikan perekonomian di Kota Semarang mengalami peningkatan karena adanya banyak kawasan industri, diantaranya: Kawasan Industri Wijaya Kusuma, Kawasan Bukit Semarang Baru, Kawasan Guna Mekar Indonesia, Kawasan Candi, Dan Kawasan Terboyo.

Pembangunan di bidang ekonomi yang selama ini menjadi titik berat pembangunan di Kota Semarang dimana pembangunan di Kota Semarang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dalam rangka mendukung pembangunan daerah Propinsi Jawa Tengah, serta bertujuan mengembangkan potensi perekonomian daerah secara optimal. Pertumbuhan ekonomi disamping dapat berdampak pada peningkatan pendapatan perkapita, pada akhirnya

juga akan berpengaruh pada pendapatan Pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh angka PDRB atas dasar harga konstan merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan Kota Semarang.

4.2.3 Kota Surabaya

Kota Surabaya merupakan ibukota Provinsi Jawa Timur yang disebut juga kota metropolitan kedua setelah Jakarta. Memiliki luas wilayah Kota Surabaya seluruhnya kurang lebih 326,36 km² yang terbagi dalam 31 Kecamatan dan 154 Desa/Kelurahan.

Kota Surabaya memiliki peran strategis pada skala nasional sebagai pusat pelayanan kegiatan Indonesia Timur, dan pada skala regional sebagai kota perdagangan dan jasa yang pada simpul transportasi (darat, udara dan laut) nasional dan internasional sehingga memberi peluang bagi Kota Surabaya untuk meningkatkan perannya sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Letak Kota Surabaya sangat strategis, menghubungkan antara Kota Surabaya dengan kota-kota di sekitarnya yaitu kota/kabupaten yang ada dalam Gerbang Kertosusilo, sehingga sangat mendukung percepatan pembangunan di Kota Surabaya. Demikian juga sebaliknya, pertumbuhan Kota Surabaya juga berpengaruh pada perkembangan kota/kabupaten di sekitarnya, secara sektoral maupun keruangan.

Kawasan Strategis untuk Pendukung Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, diantaranya: Kawasan Pergudangan dan Industri

Margomulyo, Kawasan Tunjungan, Kawasan Kaki Jembatan Wilayah Suramadu-Pantai Kenjeran, Kawasan Kota Tepi Pantai, dan Kawasan Terpadu Surabaya Barat. Dengan demikian, kawasan Kota Surabaya memiliki potensi sebagai kawasan perdagangan dan jasa skala regional yang tercermin dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya.

4.2.4 Kabupaten Gresik

Kabupaten Gresik memiliki luas wilayah 1.191,25 km². Secara administratif, Kabupaten Gresik terbagi menjadi 18 Kecamatan terdiri dari 330 Desa dan 26 Kelurahan. Kabupaten Gresik merupakan kawasan yang berpotensi berkembang pesat dalam konstelansi Surabaya Metropolitan Area dengan sektor unggulan industri, perdagangan dan jasa, pertanian, perikanan, dan pariwisata sehingga diharapkan kawasan tersebut menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi bahkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi bagi daerah-daerah disekitarnya.

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik tahun 2022 mencapai 7,38%. Struktur perekonomian Kabupaten Gresik didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan sebesar 49,44%. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar

ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. Struktur perekonomian Kabupaten Gresik didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, Konstruksi, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dan kategori Pertambangan dan Penggalian.

4.2.5 Kota Batam

Kota Batam adalah kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau dengan memiliki luas wilayah 1.575 km². Secara administratif, Kota Batam terbagi menjadi 12 Kecamatan dan 64 Kelurahan. Kota Batam ditetapkan sebagai lingkungan kerja daerah industri dengan didukung oleh Otoritas Pengembangan Daerah Industri Kota Batam atau lebih dikenal dengan Badan Otoritas Batam (BOB) sebagai penggerak pembangunan Batam yang kini menjadi Badan Pengusahaan (BP Batam). Pertumbuhan ekonomi di Batam mengalami peningkatan pesat dengan mendongkrak angka pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) yang masuk ke Kota Batam.

Kota Batam merupakan bagian dari kawasan khusus perdagangan bebas Batam–Bintan–Karimun (BBK). Kota Batam merupakan salah satu kota dengan letak yang sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura dan

Malaysia. Sebagai kota terencana, Kota Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi Kota Batam yang lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional menjadikan wilayah ini andalan bagi pemacu pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun bagi Provinsi Kepulauan Riau. Beragam sektor penggerak ekonomi meliputi sektor komunikasi, sektor listrik, air dan gas, sektor perbankan, sektor industri dan alih kapal, sektor perdagangan dan jasa merupakan nadi perekonomian Kota Batam yang tidak hanya merupakan konsumsi masyarakat Batam dan Indonesia tetapi juga merupakan komoditas ekspor untuk negara lain. Keberadaan kegiatan perekonomian di Kota ini juga dalam rangka meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat.

Industri di Batam terbagi menjadi industri berat dan industri ringan. Industri berat didominasi oleh industri galangan kapal, industri fabrikasi, industri baja, industri logam dan lainnya. Sedangkan industri ringan meliputi industri manufacturing, industri elektronika, industri garment, industri plastik dan lainnya. Selain itu, Batam juga dikenal memiliki produksi galangan kapal terbesar di Indonesia. Kawasan Perdagangan Bebas Indonesia (*Indonesia Free Trade Zone*) merupakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dan dilaksanakan oleh BP Batam (Badan Pengusahaan Batam) menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

di mana pelabuhan di Kota Batam, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Karimun memiliki izin bebas pajak barang ekspor-impor yang berlaku mulai 1 April 2009 oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan. Hal ini membuat barang elektronik di Kota Batam atau kendaraan dibebaskan dari PPN, dan menyebabkan barang elektronik atau kendaraan yang akan keluar dari Batam dikenakan Pajak Tambahan.

4.3 Analisis Data

4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan diterapkan menilai data dengan menjelaskan informasi seperti yang telah dikumpulkan, tanpa berusaha untuk menarik penilaian yang luas atau umum (Sugiyono, 2018). Statistik deskriptif membagikan ringkasan data berdasarkan mean, standart deviasi, maksimum, dan minimum. Berikut adalah hasil olah statistik:

Tabel 4. 7
Hasil Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah (PAD = X1)	40	13171254788,00	28583366478,00	21481920590,8000	3734166062,21099
Dana Alokasi Umum (DAU = X2)	40	10221295374,00	98650242318,00	51252523612,8250	38364112840,64810
Belanja Modal (BM = Z)	40	5684412059,00	12085250949,00	9790591577,1250	1611368300,60553
Pendapatan Perkapita (PP = Y)	40	10185854,00	105847022,00	80849571,5500	16961983,46879
Valid N (listwise)	40				

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2024

Hasil statistik deskriptif menunjukkan karakteristik dari empat variabel yang diamati dalam sampel sebanyak 40 observasi. Untuk variabel "Pendapatan Asli Daerah (PAD = X1)", rata-rata pendapatan asli daerah adalah 21,481,920,590.80, dengan deviasi standar sebesar 3,734,166,062.21, dan rentang nilai antara 13,171,254,788 hingga 28,583,366,478. Variabel "Dana Alokasi Umum (DAU = X2)" memiliki rata-rata dana alokasi umum sebesar 51,252,523,612.83, dengan deviasi standar 38,364,112,840.65, dan rentang nilai antara 10,221,295,374 hingga 98,650,242,318. Untuk variabel "Belanja Modal (BM = Z)", rata-rata belanja modal adalah 9,790,591,577.13, dengan deviasi standar sebesar 1,611,368,300.61, dan rentang nilai antara 5,684,412,059 hingga 12,085,250,949. Terakhir, variabel "Pendapatan Perkapita (PP = Y)" memiliki rata-rata pendapatan perkapita sebesar 80,849,571.55, dengan deviasi standar 16,961,983.47, dan rentang nilai antara 10,185,854 hingga 105,847,022.

4.3.2 Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk memastikan apakah distribusi sampel yang digunakan normal. Nilai residual yang berdistribusi normal menunjukkan asumsi dalam model regresi linier. Model regresi yang baik memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak diuji secara statistik. Uji

normalitas Kolmogorov-Smirnov digunakan dalam program SPSS untuk menguji normalitas data. Menurut Ghozali (2006), probabilitas (asymtotic significance) dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan:

- Jika probabilitas $> 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah normal.
- Jika probabilitas $< 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal.

Tabel 4. 8
Hasil Uji K-S Persamaan Pertama
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-0,0000010
	Std. Deviation	1388544164,96352000
Most Extreme Differences	Absolute	0,089
	Positive	0,089
	Negative	-0,071
Test Statistic		0,089
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2024

Tabel 4. 9
Hasil Uji K-S Persamaan Kedua

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	15802711,20387180
Most Extreme Differences	Absolute	0,117
	Positive	0,075
	Negative	-0,117
Test Statistic		0,117
Asymp. Sig. (2-tailed)		,175 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2024

Tabel 4. 10
Hasil Uji Normalitas

Variabel	Dependen	Signifikansi	Kesimpulan
Pendapatan Asli Daerah (PAD = X1)	Belanja Modal	0,200	Normal
Dana Alokasi Umum (DAU = X2)			
Pendapatan Asli Daerah (PAD = X1)	Pendapatan Perkapita	0,175	Normal
Dana Alokasi Umum (DAU = X2)			
Belanja Modal (BM = Z)			

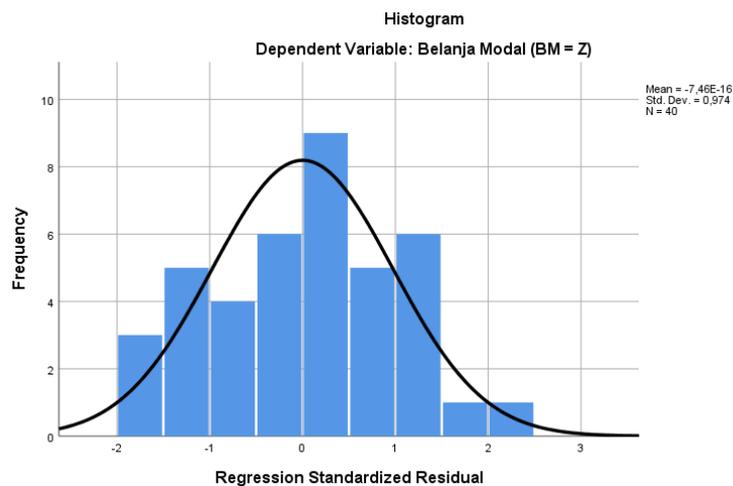
Sumber: Hasil olah data SPSS yang sudah diringkas, 2024

Hasil uji normalitas dapat dilihat tabel 4.10 di atas pada persamaan pertama menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,200 dan persamaan kedua menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,175. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan taraf signifikansi 5% (0,05). Hal tersebut memberikan gambaran bahwa sebaran data tidak menunjukkan penyimpangan dari kurva normalnya, yang berarti bahwa sebaran data dari persamaan pertama dan persamaan kedua memenuhi asumsi normalitas.

Untuk lebih memperjelas apakah distribusi data normal atau tidak, maka dalam penelitian ini akan disajikan dalam grafik histogram persamaan pertama dan persamaan kedua yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun demikian dengan hanya melihat histogram hal ini bisa menyesatkan kususny untuk jumlah data yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif

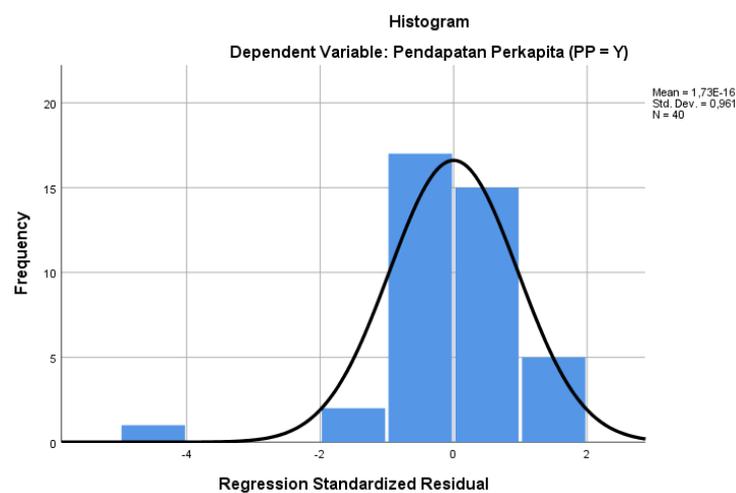
dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan *ploting* data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2006). Hasil grafik histogram dan *scatter plot* untuk uji normalitas adalah sebagai berikut:

Gambar 4. 1
Hasil Uji Normalitas Histogram Persamaan Pertama



Sumber: Hasil olah data SPSS, 2024

Gambar 4. 2
Hasil Uji Normalitas Histogram Persamaan Kedua

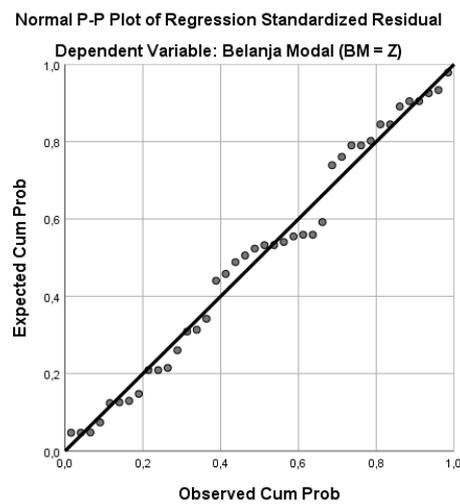


Sumber: Hasil olah data SPSS, 2024

Dari gambar 4.1 dan gambar 4.2 diatas, dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang mendekati normal.

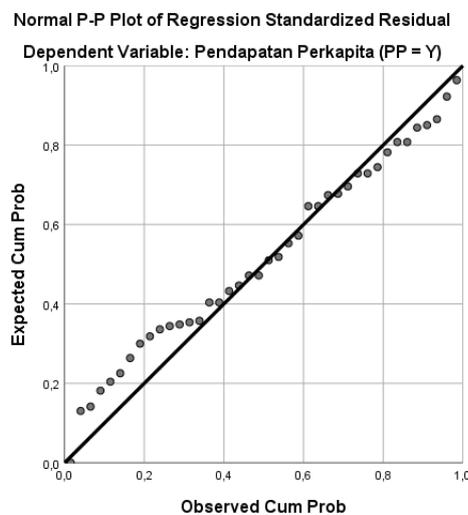
Berikut ini gambar hasil uji Normal P-Plot untuk lebih meyakinkan bahwa data penelitian terdistribusi secara normal:

Gambar 4. 3
Hasil Uji Normalitas P-Plot Persamaan Pertama



Sumber: Hasil olah data SPSS, 2024

Gambar 4. 4
Hasil Uji Normalitas P-Plot Persamaan Kedua



Sumber: Hasil olah data SPSS, 2024

Dari gambar 4.3 dan gambar 4.4 normal P-Plot dapat dilihat bahwa data tersebar mendekati garis diagonal. Hal ini menyatakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.

2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan dengan membandingkan nilai toleransi (*tolerance value*) dan nilai *variance inflation factor* (VIF) dengan nilai yang disyaratkan. Nilai yang disyaratkan bagi nilai toleransi adalah lebih besar dari 0,10 dan untuk nilai VIF kurang dari 10 (Nasution, 2020). Berikut adalah hasil perhitungan uji multikolinearitas:

Tabel 4. 11
Hasil Uji Multikolinearitas Persamaan Pertama
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pendapatan Asli Daerah (PAD = X1)	0,901	1,110
Dana Alokasi Umum (DAU = X2)	0,901	1,110

a. Dependent Variable: Belanja Modal (BM = Z)

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2024

Tabel 4. 12
Hasil Uji Multikolinearitas Persamaan Kedua
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pendapatan Asli Daerah (PAD = X1)	0,738	1,355
Dana Alokasi Umum (DAU = X2)	0,869	1,150
Belanja Modal (BM = Z)	0,743	1,347

a. Dependent Variable: Pendapatan Perkapita (PP = Y)

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2024

Tabel 4. 13
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Dependen	Tolerance	VIF	Kesimpulan
Pendapatan Asli Daerah (PAD = X1)	Belanja Modal	0,901	1,110	Normal
Dana Alokasi Umum (DAU = X2)		0,901	1,110	
Pendapatan Asli Daerah (PAD = X1)	Pendapatan Perkapita	0,738	1,355	Normal
Dana Alokasi Umum (DAU = X2)		0,869	1,150	
Belanja Modal (BM = Z)		0,743	1,347	

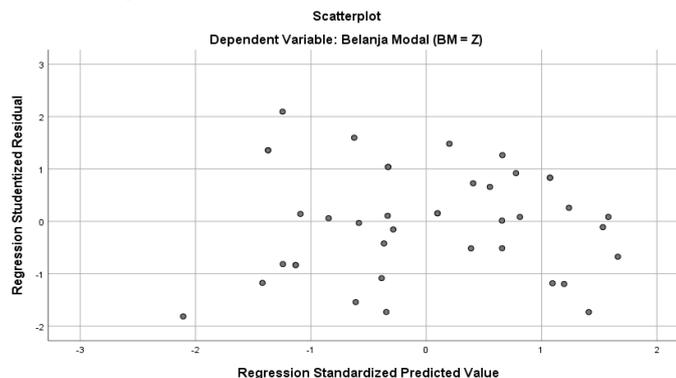
Sumber: Hasil olah data SPSS yang sudah diringkas, 2024

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.13 di atas, dapat diketahui bahwa nilai toleransi masing-masing variabel adalah lebih dari 0,1 dan untuk nilai VIF masing-masing variabel kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel pada data penelitian.

3) Uji Heteroskedastisitas

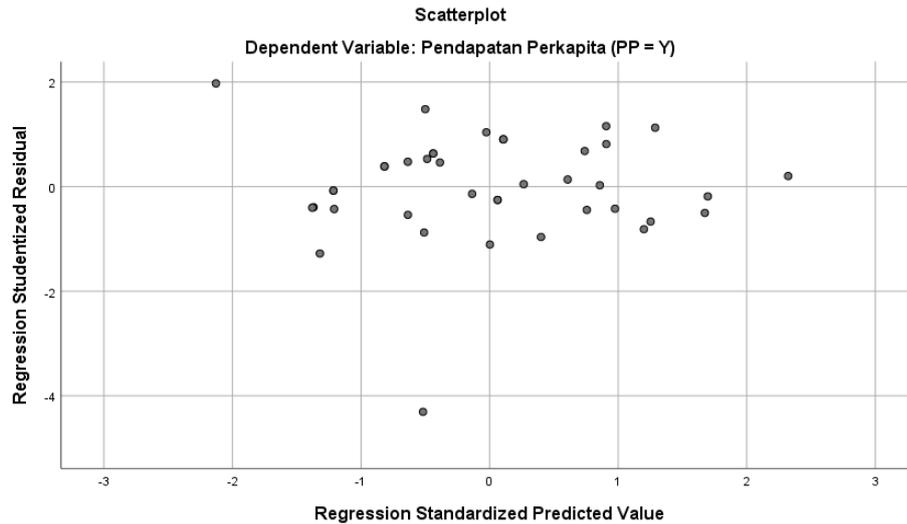
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Gambar 4. 5
Hasil Uji Heteroskedastisitas Persamaan Pertama



Sumber: Hasil olah data SPSS, 2024

Gambar 4. 6
Hasil Uji Heteroskedastisitas Persamaan Kedua



Sumber: Hasil olah data SPSS, 2024

Berdasarkan hasil gambar 4.5 dan gambar 4.6 di atas, terlihat titik-titik yang tersebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta baik diatas maupun dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada data penelitian.

Berikut ini uji glejser untuk meyakinkan bahwa data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas:

Tabel 4. 14
Hasil Uji Glejser Persamaan Pertama
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	2283301197,922	849303956,012		2,688	0,011
Pendapatan Asli Daerah (PAD = X1)	-0,058	0,036	-0,269	-1,625	0,113
Dana Alokasi Umum (DAU = X2)	0,002	0,003	0,073	0,443	0,660

a. Dependent Variable: AbsRes2

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2024

Tabel 4. 15
Hasil Uji Glejser Persamaan Kedua
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	16800825,248	14691777,565		1,144	0,260
Pendapatan Asli Daerah (PAD = X1)	0,000	0,001	-0,156	-0,829	0,412
Dana Alokasi Umum (DAU = X2)	-6,276E-05	0,000	-0,214	-1,233	0,226
Belanja Modal (BM = Z)	0,001	0,001	0,109	0,582	0,564

a. Dependent Variable: AbsRes1

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2024

Tabel 4. 16
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Dependen	Sig.	Kesimpulan
Pendapatan Asli Daerah (PAD = X1)	Belanja Modal (AbsRes)	0,113	Normal
Dana Alokasi Umum (DAU = X2)		0,660	
Pendapatan Asli Daerah (PAD = X1)	Pendapatan Perkapita (AbsRes)	0,412	Normal
Dana Alokasi Umum (DAU = X2)		0,226	
Belanja Modal (BM = Z)		0,564	

Sumber: Hasil olah data SPSS yang sudah diringkas, 2024

Berdasarkan hasil tabel 4.16 di atas, diperoleh nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 untuk setiap variabel. Maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian sudah terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

4) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan dengan model Durbin-Watson (*dw test*). Model regresi yang baik tidak memiliki autokorelasi. Autokorelasi adalah ketika variabel *error-term* pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel *error-term* pada periode lain, yang menunjukkan bahwa variabel *error-term* tersebut tidak secara kebetulan. Uji signifikansi menjadi tidak efektif

karena pelanggaran terhadap asumsi ini menyebabkan interval keyakinan terhadap hasil estimasi menjadi lebih besar.

Nilai DW statistik table (du) dibandingkan dengan nilai DW data (d), dengan wilayah $du < d < 4-du$. Ini adalah langkah pertama dalam mengidentifikasi adanya autokorelasi.

Tabel 4. 17
Hasil Uji Durbin-Watson Persamaan Pertama
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,507 ^a	0,257	0,217	1425578507,74093	1,882

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum (DAU = X2), Pendapatan Asli Daerah (PAD = X1)

b. Dependent Variable: Belanja Modal (BM = Z)

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2024

Tabel 4. 18
Hasil Uji Durbin-Watson Persamaan Kedua

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,363 ^a	0,132	0,060	16447983,30624	1,935

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal (BM = Z), Dana Alokasi Umum (DAU = X2), Pendapatan Asli Daerah (PAD = X1)

b. Dependent Variable: Pendapatan Perkapita (PP = Y)

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2024

Tabel 4. 19
Hasil Uji Autokorelasi

Variabel	Dependen	Sig.	Kesimpulan
Pendapatan Asli Daerah (PAD = X1)	Belanja Modal (AbsRes)	1,882	Normal
Dana Alokasi Umum (DAU = X2)			
Pendapatan Asli Daerah (PAD = X1)	Pendapatan Perkapita (AbsRes)	1,935	Normal
Dana Alokasi Umum (DAU = X2)			
Belanja Modal (BM = Z)			

Sumber: Hasil olah data SPSS yang sudah diringkas, 2024

Berdasarkan hasil tabel 4.19 di atas, nilai *Durbin Watson* sebesar 1.882 dan 1,935, pembandingan menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel 40 (n), dan jumlah variabel

independen 2 dan 3 ($k=2$ & 3), maka di tabel DurbinWatson akan didapat nilai du sebesar 1,600 untuk model pertama dan model dua sebesar 1,658. Pada model pertama, karena nilai DW 1,882 lebih besar dari batas atas (du) 1,600 dan kurang dari $4 - 1.600$ (2.400). Pada model kedua, karena nilai DW 1,935 lebih besar dari batas atas (du) 1,658 dan kurang dari $4 - 1.658$ (2.342). Maka dapat disimpulkan untuk model pertama dan model kedua bahwa tidak terdapat autokorelasi.

4.3.3 Analisis Jalur

1) Uji Regresi Linear Berganda

Teknik analisis yang digunakan selanjutnya adalah regresi berganda. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS 26 yang dalam perhitungannya diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 20
Hasil Uji Regresi Linear Berganda Persamaan Pertama
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	6211207494,858	1532730227,916		4,052	0,000		
Pendapatan Asli Daerah (PAD = X1)	0,184	0,064	0,426	2,854	0,007	0,901	1,110
Dana Alokasi Umum (DAU = X2)	-0,007	0,006	-0,172	-1,153	0,256	0,901	1,110

a. Dependent Variable: Belanja Modal (BM = Z)

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2024

Tabel 4. 21
Hasil Uji Regresi Linear Berganda Persamaan kedua
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	50313424,056	21249348,372		2,368	0,023		
	Pendapatan Asli Daerah (PAD = X1)	0,002	0,001	0,413	2,283	0,028	0,738	1,355
	Dana Alokasi Umum (DAU = X2)	6,937	0,000	0,157	0,942	0,352	0,869	1,150
	Belanja Modal (BM = Z)	-0,001	0,002	-0,129	-0,716	0,479	0,743	1,347

a. Dependent Variable: Pendapatan Perkapita (PP = Y)

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2024

Tabel 4. 22
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Dependen	Konstanta	Tolerance	Arah
Pendapatan Asli Daerah (PAD = X1)	Belanja Modal	6211	0,184	Positif
Dana Alokasi Umum (DAU = X2)			-0,007	Negatif
Pendapatan Asli Daerah (PAD = X1)	Pendapatan Perkapita	5031	0,002	Positif
Dana Alokasi Umum (DAU = X2)			6,937	Positif
Belanja Modal (BM = Z)			-0,001	Negatif

Sumber: Hasil olah data SPSS yang sudah diringkas, 2024

Dari tabel 4.22 diatas, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Z = 6211 + 0,184 X1 - 0,007 X2$$

$$Y = 5031 + 0,002 X1 + 6,937 X2 - 0,001 Z$$

Interpretasi model pertama:

- 1) Nilai konstanta 6211 menunjukkan bahwa apabila Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum sebesar 0, maka tingkat Belanja Modal adalah sebesar 6211.
- 2) Nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,184 nilai positif. Hal ini dapat diartikan bahwa

setiap terjadinya peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah sebesar 1 kali maka tingkat Belanja Modal meningkat sebesar 0,184.

- 3) Nilai koefisien Dana Alokasi Umum sebesar 0,301 nilai negatif. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap terjadinya peningkatan pada Dana Alokasi Umum sebesar 1 kali maka tingkat Belanja Modal menurun sebesar 0,301.

Interpretasi model kedua:

- 1) Nilai konstanta 5031 menunjukkan bahwa apabila Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum sebesar 0, maka tingkat Pendapatan Perkapita adalah sebesar 5031.
- 2) Nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,002 nilai positif. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap terjadinya peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah sebesar 1 kali maka tingkat Pendapatan Perkapita meningkat sebesar 0,002.
- 3) Nilai koefisien Dana Alokasi Umum sebesar 6,937 nilai positif. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap terjadinya peningkatan pada Dana Alokasi Umum sebesar 1 kali maka tingkat Pendapatan Perkapita meningkat sebesar 6,937.

- 4) Nilai koefisien Belanja Modal sebesar -0,001 nilai negatif. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap terjadinya penurunan pada Belanja Modal sebesar 1 kali maka tingkat Pendapatan Perkapita meningkat sebesar -0,001.

4.3.4 Uji Hipotesis

1) Uji t (Uji Parsial)

Penggunaan uji t adalah untuk mengetahui pengaruh dari variabel dependen. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan perangkat lunak SPSS, yang mana pengujian dilakukan dalam signifikan level 0,05 ($\alpha = 5\%$). Adapun kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

Tabel 4. 23
Hasil Uji T Persamaan Pertama
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	6211207494,858	1532730227,916		4,052	0,000
Pendapatan Asli Daerah (PAD = X1)	0,184	0,064	0,426	2,854	0,007
Dana Alokasi Umum (DAU = X2)	-0,007	0,006	-0,172	-1,153	0,256

a. Dependent Variable: Belanja Modal (BM = Z)

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2024

Tabel 4. 24
Hasil Uji T Persamaan Kedua

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	50313424,056	21249348,372		2,368	0,023
Pendapatan Asli Daerah (PAD = X1)	0,002	0,001	0,413	2,283	0,028
Dana Alokasi Umum (DAU = X2)	6,937E-05	0,000	0,157	0,942	0,352
Belanja Modal (BM = Z)	-0,001	0,002	-0,129	-0,716	0,479

a. Dependent Variable: Pendapatan Perkapita (PP = Y)

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2024

Tabel 4. 25
Hasil Pengujian Hipotesis Secara Parsial

Variabel	Dependen	t hitung	Sig.	Kesimpulan
Pendapatan Asli Daerah (PAD = X1)	Belanja Modal	2,854	0,007	Signifikan
Dana Alokasi Umum (DAU = X2)		-1,153	0,256	Tidak Signifikan
Pendapatan Asli Daerah (PAD = X1)	Pendapatan Perkapita	2,283	0,028	Signifikan
Dana Alokasi Umum (DAU = X2)		0,942	0,352	Tidak Signifikan
Belanja Modal (BM = Z)		-0,716	0,479	Tidak Signifikan

Sumber: Hasil olah data SPSS yang sudah diringkas, 2024

Hasil perhitungan tabel 4.25 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki hasil pengujian secara parsial (Uji T), diketahui bahwa t-hitung lebih besar dari t-tabel yaitu $2,854 > 2,028$ dan nilai signifikansi sebesar 0,007 lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal.
- 2) Variabel Dana Alokasi Umum memiliki hasil pengujian secara parsial (Uji T), diketahui bahwa t-hitung lebih kecil

dari t-tabel yaitu $-1,153 < 2,028$ dan nilai signifikansi sebesar 0,256 lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa Dana Alokasi Umum secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal.

- 3) Variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki hasil pengujian secara parsial (Uji T), diketahui bahwa t-hitung lebih besar dari t-tabel yaitu $2,283 > 2,028$ dan nilai signifikansi sebesar 0,028 lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Perkapita.
- 4) Variabel Dana Alokasi Umum memiliki hasil pengujian secara parsial (Uji T), diketahui bahwa t-hitung lebih kecil dari t-tabel yaitu $0,942 < 2,028$ dan nilai signifikansi sebesar 0,352 lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa Dana Alokasi Umum secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Perkapita.
- 5) Variabel Belanja Modal memiliki hasil pengujian secara parsial (Uji T), diketahui bahwa t-hitung lebih kecil dari t-tabel yaitu $-0,716 < 2,028$ dan nilai signifikansi sebesar 0,479 lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa Belanja Modal secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Perkapita.

2) Uji F (Uji Simultan)

Pengujian simultan ini menggunakan uji F, yaitu nilai signifikansi F dan nilai signifikansi 0,05 dibandingkan dalam pengujian simultan ini.

Tabel 4. 26
Hasil Uji F Persamaan Pertama

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	26069663183541700000,000	2	13034831591770800000,000	6,414	,004 ^b
	Residual	75194141024115800000,000	37	2032274081732860000,000		
	Total	101263804207657000000,000	39			

a. Dependent Variable: Belanja Modal (BM = Z)

b. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum (DAU = X2), Pendapatan Asli Daerah (PAD = X1)

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2024

Tabel 4. 27
Hasil Uji F Persamaan Kedua

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1481344870292330,000	3	493781623430777,000	1,825	,160 ^b
	Residual	9739301574326090,000	36	270536154842391,000		
	Total	11220646444618400,000	39			

a. Dependent Variable: Pendapatan Perkapita (PP = Y)

b. Predictors: (Constant), Belanja Modal (BM = Z), Dana Alokasi Umum (DAU = X2), Pendapatan Asli Daerah (PAD = X1)

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2024

Tabel 4. 28
Hasil Pengujian Hipotesis Secara Simultan

Variabel	Dependen	F hitung	Sig.	Kesimpulan
Pendapatan Asli Daerah (PAD = X1)	Belanja Modal	6,414	0,004	Signifikan
Dana Alokasi Umum (DAU = X2)				Tidak Signifikan
Pendapatan Asli Daerah (PAD = X1)	Pendapatan Perkapita	1,825	0,160	Signifikan
Dana Alokasi Umum (DAU = X2)				Tidak Signifikan
Belanja Modal (BM = Z)				Tidak Signifikan

Sumber: Hasil olah data SPSS yang sudah diringkas, 2024

Berdasarkan hasil tabel 4.28 di atas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi pada model pertama adalah sebesar 0,004 yang lebih kecil dari 0,05 yang mana hal tersebut berarti bahwa

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal. Pada model kedua adalah sebesar 0,160 yang lebih besar dari 0,05 yang mana hal tersebut berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal secara bersama-sama (simultan) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Perkapita.

3) Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien Determinasi ditentukan dengan nilai Adjusted R Square.

Tabel 4. 29
Hasil Koefisien Determinasi Persamaan Pertama
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	,507 ^a	0,257	0,217

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum (DAU = X2), Pendapatan Asli Daerah (PAD = X1)

b. Dependent Variable: Belanja Modal (BM = Z)

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2024

Tabel 4. 30
Hasil Koefisien Determinasi Persamaan Kedua

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	,363 ^a	0,132	0,060

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal (BM = Z), Dana Alokasi Umum (DAU = X2), Pendapatan Asli Daerah (PAD = X1)

b. Dependent Variable: Pendapatan Perkapita (PP = Y)

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2024

Tabel 4. 31
Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi

Variabel	Dependen	R^2	Adj. R^2	Kesimpulan
Pendapatan Asli Daerah (PAD = X1)	Belanja Modal	0,257	0,217	25,7%
Dana Alokasi Umum (DAU = X2)				
Pendapatan Asli Daerah (PAD = X1)	Pendapatan Perkapita	0,132	0,060	6%
Dana Alokasi Umum (DAU = X2)				
Belanja Modal (BM = Z)				

Sumber: Hasil olah data SPSS yang sudah diringkaskan, 2024

Berdasarkan hasil tabel 4.31 di atas, pada model pertama diperoleh nilai R^2 sebesar 0,257 atau 25,7%. Hal ini menunjukkan bahwa Belanja Modal dapat dipengaruhi sebesar 25,7% oleh variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum. Sedangkan 74,3% Belanja Modal dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian yang digunakan pada penelitian ini.

Pada model kedua diperoleh nilai Adjusted R^2 sebesar 0,060 atau 6%. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Perkapita dapat dipengaruhi sebesar 6% oleh variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal. Sedangkan 94% Pendapatan Perkapita dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian yang digunakan pada penelitian ini.

4.3.5 Uji Sobel

Uji hipotesis mediasi dilakukan dengan uji Sobel yang dikembangkan oleh Sobel. Uji sobel dilakukan dengan menguji kekuatan pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) variabel independen (X) ke variabel dependen (Y) melalui variabel mediasi (Z).

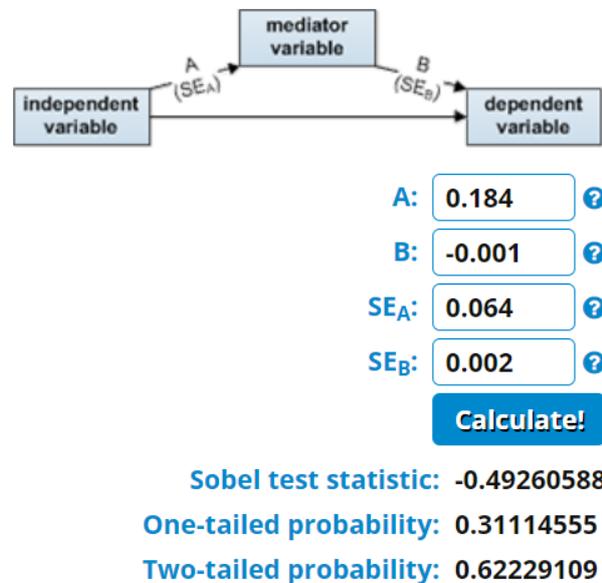
Tabel 4. 32
Hasil Uji Sobel

Variabel	Dependen	B	SE	Sig.	Kesimpulan
Pendapatan Asli Daerah (PAD = X1)	Belanja Modal	0,184	0,064	0,622	Tidak Signifikan
Dana Alokasi Umum (DAU = X2)		-0,007	0,006	0,645	Tidak Signifikan
Belanja Modal (BM = Z)	Pendapatan Perkapita	-0,001	0,002		

Sumber: Hasil olah data SPSS yang sudah diringkas, 2024

Berikut hasil Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Perkapita melalui Belanja Modal

Gambar 4. 7
Hasil Uji Sobel



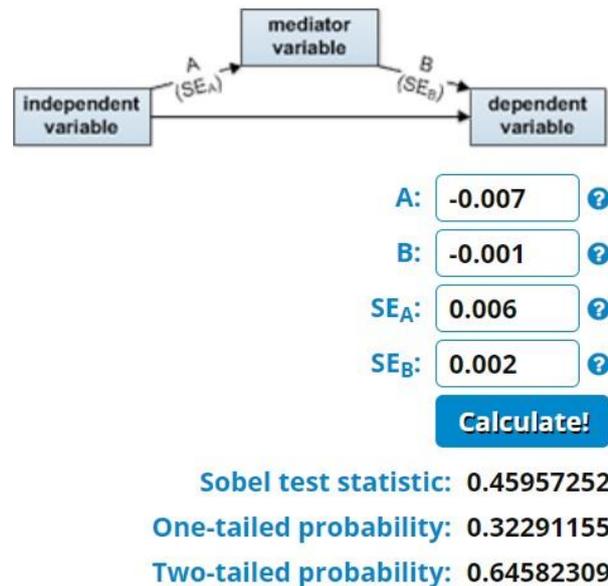
Sumber: Hasil olah data SPSS yang sudah diringkas, 2024

Berdasarkan gambar 4.7 diatas, hasil uji Sobel menunjukkan bahwa hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Perkapita melalui Belanja Modal tidak signifikan, dengan koefisien regresi (B) sebesar 0.184 dan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0.622. Ini mengindikasikan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah tidak

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Perkapita melalui penggunaan Belanja Modal sebagai mediator.

Berikut hasil Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Perkapita melalui Belanja Modal

Gambar 4. 8
Hasil Uji Sobel



Sumber: Hasil olah data SPSS yang sudah diringkas, 2024

Berdasarkan gambar 4.8 diatas, hasil yang serupa juga terlihat dalam hubungan antara Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Perkapita melalui Belanja Modal, yang juga tidak signifikan dengan koefisien regresi (B) -0.007 dan nilai signifikansi (Sig.) 0.645. Dengan demikian, tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum atau Pendapatan Asli Daerah memiliki dampak signifikan terhadap Pendapatan Perkapita melalui penggunaan Belanja Modal sebagai mediator dalam konteks ini.

4.4 Pembahasan

Berdasarkan pada hasil pengujian yang telah dilakukan di atas, maka dalam penelitian ini dapat ditemukan beberapa hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pengujian Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Perkapita pada Wilayah Industri Tahun 2015-2022.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Pendapatan Perkapita pada Wilayah Industri Tahun 2015-2022. Pendapatan Asli Daerah secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Perkapita, seperti yang ditunjukkan oleh hasil pengujian secara parsial (Uji T), di mana $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$, yaitu $2,283 > 2,028$ dengan nilai signifikan $0,028 < 0,05$. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmadhani, 2019) yang menyatakan bahwa variabel PAD berpengaruh terhadap Pendapatan Perkapita.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kenaikan Pendapatan Asli Daerah di wilayah industri pada tahun 2015–2022 akan meningkatkan Pendapatan Perkapita masyarakat pendapatan yang berasal dari pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan sumber pendapatan lain yang sah dikenal sebagai pendapatan asli daerah. Tujuannya adalah untuk memberi daerah kemampuan untuk mengumpulkan dana untuk menjalankan otonomi daerah itu sendiri.

Disisi lain, Pendapatan asli daerah yang tinggi memungkinkan pemerintah daerah pada wilayah industri ini untuk menginvestasikan

lebih banyak dalam infrastruktur dasar seperti jalan, transportasi, dan utilitas umum lainnya yang dapat menunjang kawasan industri lebih baik lagi. Infrastruktur yang baik mendorong pertumbuhan industri dengan memfasilitasi mobilitas barang dan orang, serta menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh industri. PAD yang besar juga memungkinkan pemerintah daerah untuk memberikan insentif, dukungan, dan fasilitas bagi industri lokal dengan menerapkan pembebasan lahan, pengurangan pajak, atau fasilitas lain yang meningkatkan daya saing industri. Serta Dengan pendapatan asli daerah yang cukup, pemerintah daerah dapat mengembangkan kawasan industri yang ramah lingkungan dan memiliki infrastruktur yang lengkap. Kawasan industri yang baik akan menarik investasi dari perusahaan nasional maupun internasional, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan perusahaan dan pendapatan perkapita masyarakat pada wilayah industri setempat.

2) Pengujian Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pendapatan Perkapita pada Wilayah Industri Tahun 2015-2022.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Perkapita pada Wilayah Industri Tahun 2015-2022. Ditunjukkan dengan hasil pengujian secara parsial (Uji T), diketahui bahwa t-hitung lebih kecil dari t-tabel yaitu $0,942 < 2,028$ dengan nilai signifikan $0,352 > 0,05$ maka secara parsial Dana Alokasi Umum tidak memiliki pengaruh

yang signifikan terhadap Pendapatan Perkapita. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rania Aliya et al., 2023) yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Pendapatan Perkapita.

Hal ini dapat disimpulkan bahwasannya wilayah industri umumnya memiliki PAD yang cukup besar karena adanya sektor industri yang aktif dan pajak yang diperoleh dari aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Sehingga, kontribusi DAU terhadap total pendapatan daerah mungkin relatif kecil dibandingkan dengan PAD, sehingga dampaknya terhadap pendapatan perkapita kurang signifikan. Disisi lain, wilayah industri cenderung memiliki struktur ekonomi yang lebih dinamis dan berorientasi pada sektor industri. Oleh karena itu, sumber daya dan dana yang diterima dari pemerintah pusat melalui DAU mungkin kurang efisien jika digunakan dalam mendukung pertumbuhan industri terutama di wilayah industri Kabupaten Bekasi, Kota Semarang, Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Kota Batam tahun 2015-2022 yang diteliti.

Pengalokasian DAU sering kali digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah daerah, seperti pembayaran gaji pegawai, operasional kantor, dan pengeluaran rutin lainnya. Penggunaan DAU ini mungkin tidak secara langsung berkaitan dengan peningkatan pendapatan perkapita di wilayah industri. Melalui faktor lain dalam skala prioritas penggunaan DAU di setiap daerah dapat

berbeda-beda tergantung pada kebutuhan dan strategi pembangunan daerah masing-masing.

- 3) Pengujian Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pada Wilayah Industri Tahun 2015-2022.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Wilayah Industri Tahun 2015-2022. Ditunjukkan dengan hasil pengujian secara parsial (Uji T), diketahui bahwa t-hitung lebih besar dari t-tabel yaitu $2,854 > 2,028$ dengan nilai signifikan $0,007 < 0,05$ maka secara parsial Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Perkapita. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yustriawan, 2021) yang menyatakan bahwa variabel PAD berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh di suatu wilayah industri dan semakin besar pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah yang benar, semakin besar anggaran belanja modal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah, semakin besar anggaran belanja modal.

Disisi lain, PAD sering kali menjadi sumber pendanaan utama bagi pemerintah daerah untuk kegiatan pembangunan, termasuk belanja modal. Sebagai hasilnya, tingkat PAD yang tinggi akan memberikan pemerintah daerah lebih banyak ruang untuk mengalokasikan dana ke

belanja modal, termasuk infrastruktur, fasilitas industri, dan investasi lainnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah industri. Infrastruktur yang berkualitas tinggi akan meningkatkan daya saing wilayah industri tersebut, investasi dalam belanja modal yang didukung oleh PAD dapat meningkatkan daya saing wilayah industri dengan meningkatkan efisiensi produksi, aksesibilitas pasar, dan kualitas produk. Hal ini dapat membantu wilayah industri bersaing secara global dan menarik investasi asing maupun domestik yang lebih besar.

4) Pengujian Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Wilayah Industri Tahun 2015-2022.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal pada Wilayah Industri Tahun 2015-2022. Ditunjukkan dengan hasil pengujian secara parsial (Uji T), diketahui bahwa t -hitung lebih kecil dari t -tabel yaitu $-1,153 < 2,028$ dengan nilai signifikan $0,256 > 0,05$ maka secara parsial Dana Alokasi Umum tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Perkapita. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Wirama, 2018) menghasilkan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Hal ini dapat disimpulkan bahwasannya dana yang diterima melalui DAU sering kali memiliki batasan dalam penggunaannya, terutama dalam hal pengeluaran modal. Pemerintah daerah harus

mematuhi regulasi dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam alokasi penggunaan DAU untuk belanja modal, yang mungkin prioritas penggunaan DAU tidak selalu sesuai dengan prioritas pembangunan wilayah industri atau investasi dalam sektor industri. Pemerintah daerah mungkin lebih memilih untuk menggunakan DAU untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur umum yang tidak secara langsung terkait dengan pengembangan wilayah industri terutama Kabupaten Bekasi, Kota Semarang, Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Kota Batam.

Jumlah DAU yang diterima oleh pemerintah daerah kurang mencukupi untuk membiayai belanja modal yang besar dalam pembangunan infrastruktur atau investasi sektor industri yang memerlukan dana besar. Oleh karena itu, pemerintah daerah lebih cenderung mencari sumber dana tambahan dari berbagai sumber lain, seperti pendapatan asli daerah, pinjaman, atau investasi swasta.

- 5) Pengujian Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Perkapita melalui Belanja Modal pada Wilayah Industri Tahun 2015-2022.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan hasil uji sobel bahwa ubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Perkapita melalui Belanja Modal tidak signifikan. Ditunjukkan dengan hasil pengujian secara koefisien regresi (B) sebesar 0.184 dan nilai

signifikansi (*Sig*) sebesar 0.622, maka mengindikasikan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Perkapita melalui penggunaan Belanja Modal sebagai mediator. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sembiring, 2012) yang menghasilkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Per Kapita melalui Belanja Modal.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa meskipun PAD menjadi sumber dana utama bagi pemerintah daerah, jumlahnya mungkin tidak mencukupi untuk membiayai belanja modal yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur dan investasi sektor industri khususnya bagi wilayah industri Kabupaten Bekasi, Kota Semarang, Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Kota Batam. Wilayah industri sering kali membutuhkan investasi yang besar untuk pengembangan infrastruktur khusus, peningkatan teknologi, dan pelatihan tenaga kerja, yang mungkin melebihi kemampuan keuangan pemerintah daerah dan tidak secara langsung berdampak pada pendapatan perkapita di wilayah industri yang diteliti.

Pengaruh PAD terhadap pendapatan perkapita melalui belanja modal sebagai mediator juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi nasional dan global, serta faktor-faktor sosial dan budaya di wilayah industri tersebut. Keterkaitan yang kompleks ini membuat secara tidak langsung tidak

berpengaruh PAD terhadap pendapatan perkapita melalui belanja modal pada wilayah industri yang diteliti.

- 6) Pengujian Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pendapatan Perkapita melalui Belanja Modal pada Wilayah Industri Tahun 2015-2022.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan hasil uji sobel bahwa hubungan antara Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Perkapita melalui Belanja Modal tidak signifikan. Ditunjukkan dengan hasil pengujian secara koefisien regresi (B) sebesar -0.007 dan nilai signifikansi (*Sig*) sebesar 0.645, maka mengindikasikan bahwa variabel Dana Alokasi Umum tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Perkapita melalui penggunaan Belanja Modal sebagai mediator. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sembiring, 2012) yang menghasilkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif signifikan terhadap Pendapatan Per Kapita melalui Belanja Modal.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa keterbatasan DAU dalam membiayai pengeluaran rutin pemerintah daerah telah dihabiskan untuk keperluan rutin lainnya yang mungkin tidak langsung berdampak pada pendapatan perkapita di wilayah industri. Ketidakpastian dalam pencairan DAU juga dapat menghambat rencana pembangunan jangka panjang pemerintah daerah di wilayah industri yang berdampak pula pada pertumbuhan ekonomi setempat. Serta pendapatan DAU dari pemerintah pusat untuk pengalokasian belanja

modal yang tidak tepat atau bukan prioritas menjadikan tidak berpengaruh pula pada pendapatan perkapita khususnya wilayah industri yang diteliti. Kebijakan pemerintah daerah setempat dalam menangani prioritas alokasi belanja modal juga diperlukan dalam upaya pertumbuhan ekonomi wilayahnya.

7) Pengujian Belanja Modal terhadap Pendapatan Perkapita pada Wilayah Industri Tahun 2015-2022.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa Belanja Modal tidak memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Perkapita pada Wilayah Industri Tahun 2015-2022. Ditunjukkan dengan hasil pengujian secara parsial (Uji T), diketahui bahwa t-hitung lebih kecil dari t-tabel yaitu $-0,716 < 2,028$ dengan nilai signifikan $0,479 > 0,05$ maka secara parsial Belanja Modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Perkapita. Penelitian ini sejalan dengan hasil yang diperoleh (Yustriawan, 2021) yang menunjukkan bahwa belanja modal memiliki korelasi yang tidak signifikan terhadap pendapatan perkapita.

Hal ini dapat disimpulkan bahwasannya Belanja Modal penting untuk pembangunan infrastruktur dan investasi dalam sektor industri, keterbatasan dana dapat menghambat kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan investasi yang cukup besar. Bahkan Proses pembangunan infrastruktur dan investasi dalam sektor industri biasanya memerlukan waktu yang lama untuk memberikan hasil yang signifikan, sehingga dampaknya terhadap Pendapatan Perkapita bisa

menjadi terbatas dalam jangka waktu yang singkat. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Perkapita juga dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global dan faktor eksternal lainnya. Jika terjadi perlambatan ekonomi global atau ketidakpastian politik yang menyebabkan penurunan permintaan atas produk industri, maka investasi dalam Belanja Modal mungkin tidak mampu memberikan hasil yang diharapkan dalam meningkatkan Pendapatan Perkapita pada wilayah industri yang diteliti.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian menggunakan SPSS versi 26 dan pembahasan yang ada pada bab IV sebelumnya dapat diidentifikasi sebagian hipotesis dapat di terima. Berdasarkan hasil dari analisis dan pembahasan yang telah di jabarkan, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Perkapita pada Wilayah Industri Periode 2015-2022.
- 2) Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Perkapita pada Wilayah Industri Periode 2015-2022.
- 3) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Wilayah Industri Periode 2015-2022.
- 4) Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Wilayah Industri Periode 2015-2022.
- 5) Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Perkapita melalui Belanja Modal sebagai Variabel Intervening pada Wilayah Industri Periode 2015-2022.
- 6) Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Perkapita melalui Belanja Modal sebagai Variabel Intervening pada Wilayah Industri Periode 2015-2022.
- 7) Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Perkapita pada Wilayah Industri Periode 2015-2022.

5.2 Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan dan hasil uji yang di lakukan serta kesimpulan yang telah tercantum di bab sebelumnya, peneliti memiliki saran yang dapat digunakan adalah:

- 1) Pemerintah harus secara efektif dan efisien memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah agar Pendapatan Perkapita Masyarakat terus meningkat, terutama di wilayah industri yang diteliti.
- 2) Pemerintah Daerah harus memberi prioritas lebih besar pada alokasi Dana Alokasi Umum untuk tujuan yang lebih tepat, sehingga belanja modal dapat lebih terarah.
- 3) Peneliti selanjutnya disarankan untuk meningkatkan luas dan waktu penelitian untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Selain itu, untuk membandingkan hasil penelitian, sampel penelitian harus diambil dari lebih banyak kabupaten atau kota pada wilayah industri.
- 4) Peneliti selanjutnya juga dapat menambah variabel independen lainnya yang berpengaruh terhadap Pendapatan Perkapita.
- 5) Penelitian ini dilakukan selama delapan tahun yaitu dari 2015 sampai dengan 2022. Sehingga peneliti memberikan saran agar dapat menambah periode waktu penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adyatma, E., & Oktaviani, R. M. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 4(2), 190–205.
- Ahmad, S. (2017). Metode Penelitian Metode Penelitian. *Metode Penelitian Kualitatif*, 3(17), 43. [http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB III.pdf](http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB%20III.pdf)
- Amami, R., & Asmara, K. (2022). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal terhadap Kemiskinan di Kabupaten Ngawi. *Jurnal Ekobistek*, 11, 48–54. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v11i2.297>
- Basuki. (2021). 3.2 Definisi Variabel dan Operasional Variabel 3.2.1 Definisi Variabel. 19, 36–46.
- Cahyono, Y. T., & Kumalasari, A. (2021). Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Per Kapita (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Surakarta Tahun 2013-2019). 712–724. <https://doi.org/10.32528/psneb.v0i0.5225>
- Dalil, A., Sukidin, S., & Hartanto, W. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2018. *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 14(1), 178. <https://doi.org/10.19184/jpe.v14i1.12598>
- Frelistiyani, W. (2010). PENGARUH DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. *Skripsi Universitas Diponegoro*.
- Heliyanto, F., & Handayani, N. (2016). Pengaruh PAD, DAU, DAK Dan DBH Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* :, 5(3), 1–17.
- Heriston Sianturi, & Anastasya Astrid Eka Putri. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Banten). *Jurnal Liabilitas*, 3(1), 1–19. <https://doi.org/10.54964/liabilitas.v3i1.29>
- Imanulloh, D. W., & Purwanti, L. (2017). Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Per Kapita terhadap Indeks Pembangunan

Manusia (Studi pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa tahun 2013-2015). *Jurnal Mahasiswa FEB*, 5(2), 1–17.

- Indrianingrum, H., & Priyono, N. (2023). ANALISIS PENGARUH PAD, DAU, DAK, dan DBH TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN DAERAH DI KABUPATEN MAGELANG PADA TAHUN 2006 – 2021. *Jurnal Economina*, 2(1), 1210–1221. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i1.269>
- Juliansyah, H., & Nurbayan. (2018). Pengaruh Pendapatan Per Kapita, PDRB, dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Konsumsi Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2003-2016. *Jurnal Ekonomika Indonesia*, VII(2), 45–51.
- Ley 25.632. (2002). *Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada pemerintah kabupaten nias barat periode 2016-2021*. 8(2), 231–245.
- Marliana, R., Prasetyo, A. S., & Yulianto, P. D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak), Dana Bagi Hasil (Dbh) Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Terhadap Belanja Modal Di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2013-2020. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 2(2), 620–640. <https://doi.org/10.32477/jrabi.v2i2.489>
- Mentayani, I., Rusmanto, & Lidya, S. (2015). Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pendapatan Perkapita pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2013. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8(1), 1–19.
- Novianti, F. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal dan Dana Perimbangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Jawa Barat tahun 2011-2020. *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 2(2), 273–281. <https://doi.org/10.29313/bcses.v2i2.3235>
- Novita, H., Purba, A. Y. S. A., Br Perangin-Angin, E. S. D., Caroline, E. A., & Zai, J. K. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU dan DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal di Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara Tahun 2018-2020. *Owner*, 6(2), 2156–2166. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.839>
- Prasetyo, D. A., & Rusdi, D. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Tengah. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 5, 48–75. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimue/article/view/17867>

- Praza, E. I. (2016). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 4(1), 25–36. <https://doi.org/10.22437/ppd.v4i1.3530>
- Pubra, S. S. M. (2019). Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Perkapita pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Riau 1Sahala. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Putrayuda, T. F., Efni, Y., & Kamilah. (2017). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Pada Tingkat Kemiskinan di Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2011-2015. *Jurnal Tepak Manajemen Bisnis*, IX(3), 198–224.
- Rahmadhani, F. K. (2019). *Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Transfer Terhadap Pendapatan Perkapita Di Kota Medan*. 108.
- Rania Aliya, W., Yulsiati, H., Antina Aryani, Y., & Negeri Sriwijaya Negara, P. (2023). *the Effect of Regional Genuine Income, General Allocation Funds and Capital Expenditures on Income Per Capita of District/City Province South Sumatra Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Belanja Modal Terhadap Pendapatan Per Kapita Kabup*. 6, 1924–1933.
- Rarun, K., Kindangen, P., & Kawung, G. M. V. (2019). Analisis Dampak Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Angka Kemiskinan Kota-Kota Di Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(01), 1–13. <https://doi.org/10.35794/jpekd.23449.20.01.2019>
- Riviando, A., Agustin, H., Jurusan AkuntansiFakultas Ekonomi, A., Negeri Padang, U., & Akuntansi Fakultas Ekonomi, J. (2019). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat Tahun 2015-2017). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 1–17. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/1>
- Romadhon, S. W., & Aji, T. S. (2021). *INDEPENDENT: Journal Of Economics E-ISSN 2798-5008*. 1, 41–55.
- Sari, D. M. M. Y., & Wirama, D. G. (2018). Pengaruh PAD, DAU dan DAK pada Alokasi Belanja Modal dengan Pendapatan Per Kapita Sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 22(59), 2065. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i03.p16>

- Sari, P. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Accounting Global Journal*, 1(1), 1745–1773. <https://doi.org/10.24176/agj.v1i1.3321>
- Sasana, H. (2012). Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah dan Pendapatan per Kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 25(1), 1–12.
- Setiawan, P., Widiyanti, R., Siregar, L. M., Nurhaida, N., & Oktavia, E. (2021). Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Di Pulau Sumatera Tahun 2010-2016. *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 7(1), 44–53. <https://doi.org/10.31869/me.v7i1.2536>
- Siswiyanti, P. (2017). Pengaruh Pad, Dau, Dak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.26740/jaj.v7n1.p1-17>
- Sulaeman, A. S., & Silvia, V. (2019). Pendapatan Asli Daerah, Transfer Daerah, Dan Belanja Modal, Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 4(1), 97–112. <https://doi.org/10.29303/jaa.v4i1.61>
- Suryatiningrum, I., Indarti, I., & Adnanti, W. A. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal dengan Pendapatan Per Kapita sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Aset*, 22(2), 131–146. <https://doi.org/10.37470/1.22.2.168>
- Talangamin, O. B., Kindangen, P., & Koleangan, R. A. (2019). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA TOMOHON. *Jurnal Pembangunan Ekonomidan Keuangan Daerah*, Vol.19 No.(7), 1–11.
- Wahidmurni. (2017). *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal*. 2588–2593.
- Widyasari, N. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) (Studi Empiris Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Ilmiah FEB Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 1–16.
- Yustriawan, D. (2021). Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Perkapita melalui Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 5, 717–725. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.609>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Data PAD, DAU, Pendapatan Perkapita, dan Belanja Modal
Kabupaten Bekasi

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2015-2022

Tahun	Realisasi
2015	1.843.836.910.285
2016	1.917.814.673.704
2017	2.311.805.849.243
2018	2.094.369.342.687
2019	2.439.368.558.406
2020	2.384.139.484.622
2021	2.543.999.745.764
2022	2.537.931.758.052

Dana Alokasi Umum Kabupaten Bekasi Tahun 2015-2022

Tahun	Realisasi
2015	1.256.103.775.000
2016	1.173.508.044.000
2017	1.152.893.281.000
2018	1.152.893.281.000
2019	1.219.550.987.000
2020	1.105.266.422.000
2021	1.096.895.278.000
2022	1.097.123.037.000

Belanja Modal Kabupaten Bekasi Tahun 2015-2022

Tahun	Realisasi
2015	1.165.153.095.189
2016	1.302.248.458.477
2017	971.090.629.160
2018	853.621.639.952
2019	954.900.806.872
2020	670.123.926.245
2021	726.057.096.351
2022	745.404.155.756

PDRB, Jumlah Penduduk dan Pendapatan Perkapita Kabupaten Bekasi

Tahun 2015-2022

Tahun	PDRB	Jumlah Penduduk	Pendapatan Perkapita $\left(\frac{PDRB}{Jumlah\ Penduduk}\right)$
2015	205.950.393.450.000	3.246.013	63.447.186
2016	215.928.364.000.000	3.371.691	64.041.563
2017	228.203.598.900.000	3.500.023	65.200.599
2018	241.949.381.000.000	3.630.907	66.636.072
2019	251.502.786.000.000	3.689.984	68.158.232
2020	242.971.393.700.000	3.101.310	78.344.761
2021	251.778.518.600.000	3.157.962	79.728.166
2022	265.130.821.600.000	3.214.791	82.472.179

Lampiran 2 Data PAD, DAU, Pendapatan Perkapita, dan Belanja Modal Kota Semarang

**Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang
Tahun 2015-2022**

Tahun	Realisasi
2015	1.201.581.778.459
2016	1.491.645.900.065
2017	1.791.886.378.674
2018	1.821.274.103.250
2019	2.066.333.418.588
2020	2.024.537.808.307
2021	2.385.944.758.477
2022	2.545.991.747.658

**Dana Alokasi Umum Kota Semarang
Tahun 2015-2022**

Tahun	Realisasi
2015	1.126.847.634.000
2016	1.211.708.204.000
2017	1.190.422.387.000
2018	1.190.422.387.000
2019	1.317.186.595.000
2020	1.183.614.821.000
2021	1.167.622.970.000
2022	1.167.622.970.000

**Belanja Modal Kota Semarang
Tahun 2015-2022**

Tahun	Realisasi
2015	726.139.722.089
2016	1.026.716.904.816
2017	1.275.359.088.966
2018	1.228.459.434.270
2019	1.054.761.429.772
2020	506.420.330.795
2021	953.669.847.702
2022	1.048.844.590.189

PDRB, Jumlah Penduduk dan Pendapatan Perkapita **Kota Semarang**
Tahun 2015-2022

Tahun	PDRB	Jumlah Penduduk	Pendapatan Perkapita <i>($\frac{PDRB}{Jumlah\ Penduduk}$)</i>
2015	109.110.689.610.000	1.701.000	64.145.026
2016	115.542.560.570.000	1.729.000	66.826.235
2017	123.279.891.910.000	1.758.000	70.125.080
2018	131.266.362.570.000	1.786.000	73.497.403
2019	140.199.517.360.000	1.806.000	77.629.854
2020	137.601.979.910.000	1.652.000	83.294.176
2021	144.704.571.510.000	1.656.000	87.381.987
2022	152.999.373.960.000	1.659.000	92.223.854

Lampiran 3 Data PAD, DAU, Pendapatan Perkapita, dan Belanja Modal Kota Surabaya

**Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya
Tahun 2015-2022**

Tahun	Realisasi
2015	4.035.649.478.398
2016	4.090.206.769.388
2017	5.161.844.571.172
2018	4.972.890.868.136
2019	5.381.920.253.810
2020	4.289.960.292.366
2021	4.727.280.629.670
2022	5.314.695.257.794

**Dana Alokasi Umum Kota Surabaya
Tahun 2015-2022**

Tahun	Realisasi
2015	1.147.385.486.000
2016	1.233.380.404.000
2017	1.211.713.876.000
2018	1.211.713.876.000
2019	1.254.344.402.000
2020	1.203.461.956.000
2021	1.182.439.723.000
2022	1.182.439.723.000

**Belanja Modal Kota Surabaya
Tahun 2015-2022**

Tahun	Realisasi
2015	1.785.125.255.500
2016	1.789.394.044.827
2017	2.517.891.658.246
2018	2.430.061.039.309
2019	2.754.304.824.082
2020	1.583.663.159.605
2021	1.016.336.503.390
2022	1.766.030.466.528

PDRB, Jumlah Penduduk dan Pendapatan Perkapita **Kota Surabaya**
Tahun 2015-2022

Tahun	PDRB	Jumlah Penduduk	Pendapatan Perkapita <i>($\frac{PDRB}{Jumlah\ Penduduk}$)</i>
2015	324.215.170.000.000	2.849.000	113.799.638
2016	343.652.600.000.000	2.862.000	120.074.283
2017	364.714.820.000.000	2.875.000	126.857.328
2018	387.303.940.000.000	2.886.000	134.200.949
2019	410.879.310.000.000	2.897.000	141.829.240
2020	390.936.420.000.000	2.873.000	136.072.544
2021	407.725.830.000.000	2.880.000	141.571.468
2022	434.268.340.000.000	2.887.000	150.422.009

Lampiran 4 Data PAD, DAU, Pendapatan Perkapita, dan Belanja Modal
Kabupaten Gresik

**Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik
Tahun 2015-2022**

Tahun	Realisasi
2015	799.884.870.103
2016	715.480.938.191
2017	871.564.498.248
2018	957.255.706.269
2019	980.776.381.995
2020	924.657.913.563
2021	1.031.387.734.238
2022	1.191.799.202.154

**Dana Alokasi Umum Kabupaten Gresik
Tahun 2015-2022**

Tahun	Realisasi
2015	873.265.959.000
2016	923.469.024.000
2017	907.246.643.000
2018	909.888.092.000
2019	958.325.036.000
2020	871.987.860.000
2021	870.446.047.000
2022	870.446.047.000

**Belanja Modal Kabupaten Gresik
Tahun 2015-2022**

Tahun	Realisasi
2015	584.223.675.905
2016	413.339.658.373
2017	422.641.766.003
2018	369.883.330.557
2019	538.046.525.562
2020	281.697.688.881
2021	298.579.850.431
2022	310.157.730.143

PDRB, Jumlah Penduduk dan Pendapatan Perkapita **Kabupaten Gresik**
Tahun 2015-2022

Tahun	PDRB	Jumlah Penduduk	Pendapatan Perkapita <i>($\frac{PDRB}{Jumlah\ Penduduk}$)</i>
2015	81.380.440.000.000	1.256.000	64.793.343
2016	85.850.110.000.000	1.271.000	67.545.326
2017	90.855.600.000.000	1.285.000	70.704.747
2018	96.131.610.000.000	1.299.000	74.004.318
2019	101.346.550.000.000	1.314.000	77.128.272
2020	97.616.600.000.000	1.308.000	74.630.428
2021	101.318.690.000.000	1.321.000	76.698.478
2022	108.796.880.000.000	1.333.000	81.618.064

Lampiran 5 Data PAD, DAU, Pendapatan Perkapita, dan Belanja Modal Kota
Batam

**Pendapatan Asli Daerah Kota Batam
Tahun 2015-2022**

Tahun	Realisasi
2015	836.713.858.342
2016	881.268.969.157
2017	974.124.203.684
2018	1.084.640.559.853
2019	1.147.685.950.193
2020	975.283.123.576
2021	1.094.019.332.634
2022	1.282.185.392.071

**Dana Alokasi Umum Kota Batam
Tahun 2015-2022**

Tahun	Realisasi
2015	529.988.410.000
2016	576.930.711.000
2017	577.144.597.000
2018	599.074.016.000
2019	659.164.959.000
2020	629.854.829.000
2021	626.199.396.000
2022	627.464.615.000

**Belanja Modal Kota Batam
Tahun 2015-2022**

Tahun	Realisasi
2015	524.332.531.768
2016	524.463.723.680
2017	556.926.371.276
2018	613.438.215.481
2019	655.137.393.960
2020	309.463.968.545
2021	613.293.295.305
2022	646.111.854.046

PDRB, Jumlah Penduduk dan Pendapatan Perkapita **Kota Batam**
Tahun 2015-2022

Tahun	PDRB	Jumlah Penduduk	Pendapatan Perkapita <i>($\frac{PDRB}{Jumlah\ Penduduk}$)</i>
2015	90.457.740.000.000	1.188.000	76.142.878
2016	95.369.700.000.000	1.236.000	77.159.951
2017	97.862.560.000.000	1.283.000	76.276.352
2018	102.718.600.000.000	1.330.000	77.232.030
2019	108.800.350.000.000	1.421.000	76.566.045
2020	106.029.650.000.000	1.192.000	88.951.048
2021	111.068.950.000.000	1.230.000	90.299.959
2022	118.665.210.000.000	1.269.000	93.510.803

Lampiran 6 *Output* SPSS Analisis Deskriptif**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah (PAD = X1)	40	13171254788,00	28583366478,00	21481920590,8000	3734166062,21099
Dana Alokasi Umum (DAU = X2)	40	10221295374,00	98650242318,00	51252523612,8250	38364112840,64810
Belanja Modal (BM = Z)	40	5684412059,00	12085250949,00	9790591577,1250	1611368300,60553
Pendapatan Perkapita (PP = Y)	40	10185854,00	105847022,00	80849571,5500	16961983,46879
Valid N (listwise)	40				

Lampiran 7 *Output* SPSS Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Persamaan Pertama
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-0,0000010
	Std. Deviation	1388544164,96352000
Most Extreme Differences	Absolute	0,089
	Positive	0,089
	Negative	-0,071
Test Statistic		0,089
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.
 d. This is a lower bound of the true significance.

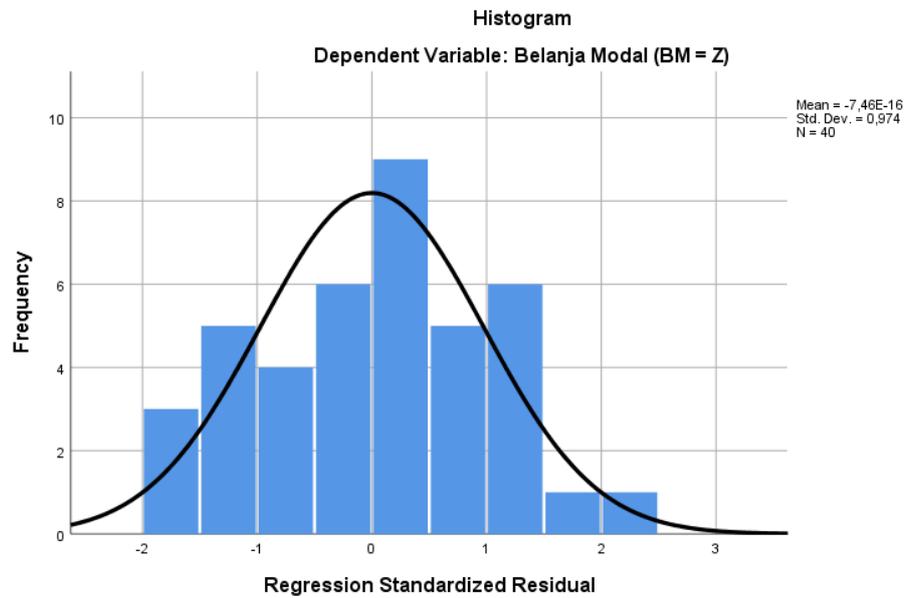
Uji Normalitas Persamaan Kedua

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

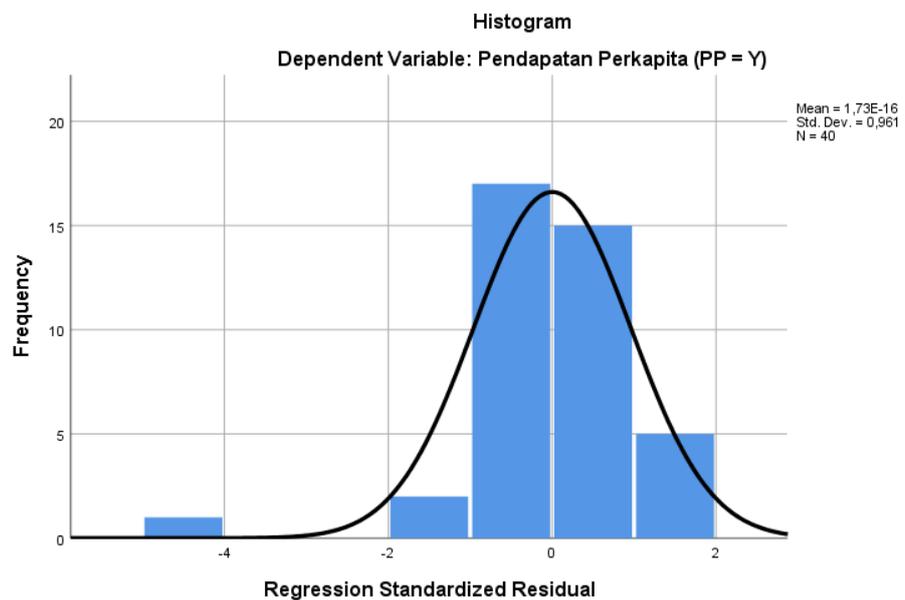
		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	15802711,20387180
Most Extreme Differences	Absolute	0,117
	Positive	0,075
	Negative	-0,117
Test Statistic		0,117
Asymp. Sig. (2-tailed)		,175 ^c

- a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.

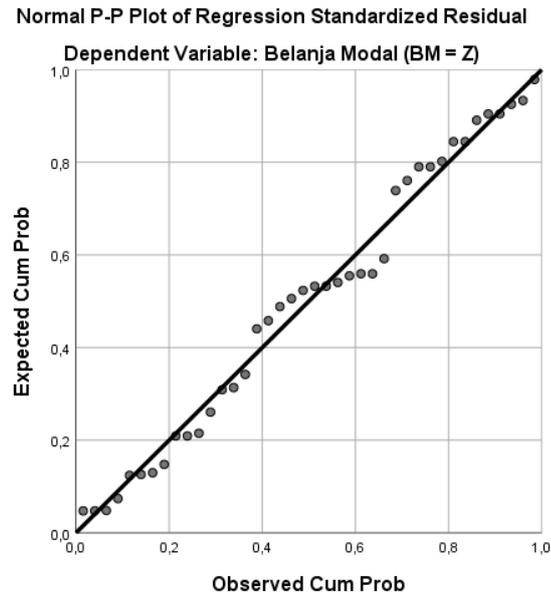
Uji Normalitas Histogram Persamaan Pertama



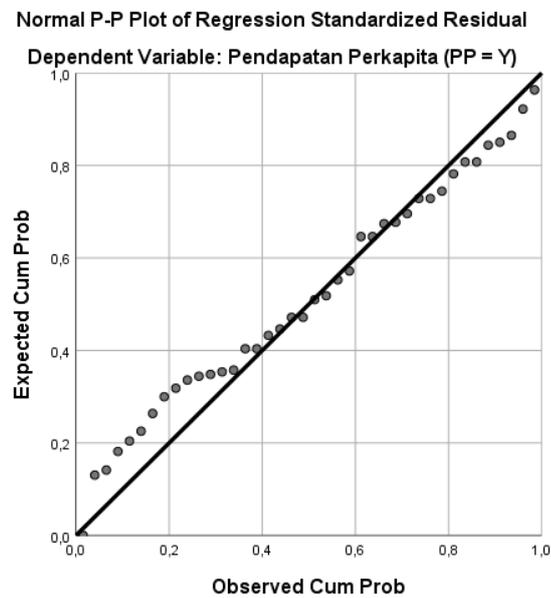
Uji Normalitas Histogram Persamaan Kedua



Uji Normalitas P-Plot Persamaan Pertama



Uji Normalitas P-Plot Persamaan Kedua



Uji Multikolinearitas Persamaan Pertama

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pendapatan Asli Daerah (PAD = X1)	0,901	1,110
Dana Alokasi Umum (DAU = X2)	0,901	1,110

a. Dependent Variable: Belanja Modal (BM = Z)

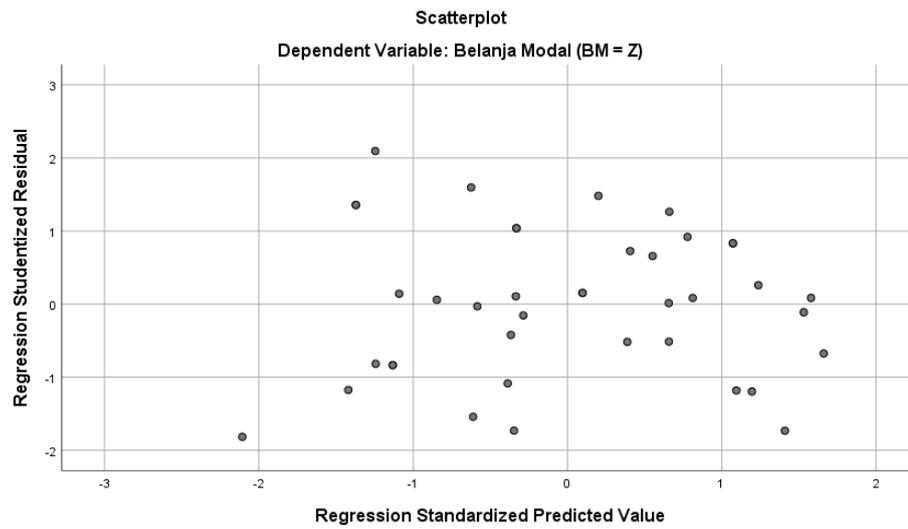
Uji Multikolinearitas Persamaan Kedua

Coefficients^a

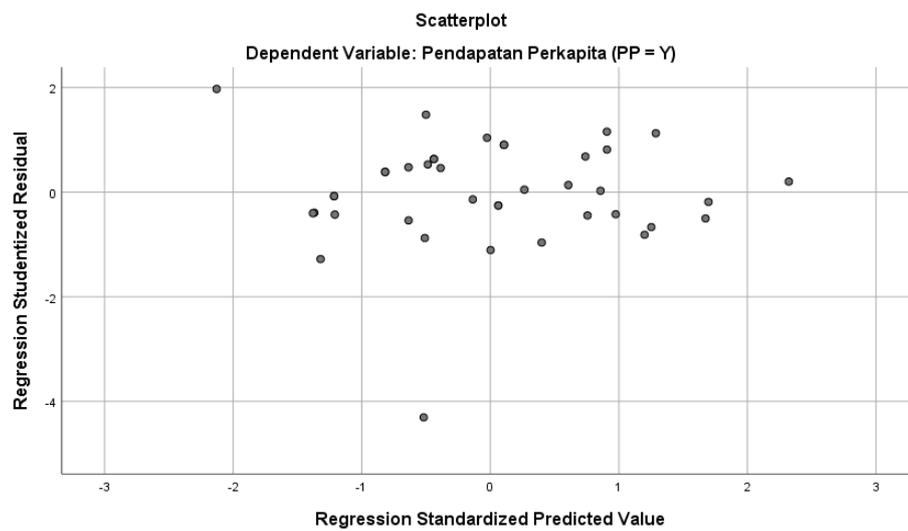
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pendapatan Asli Daerah (PAD = X1)	0,738	1,355
Dana Alokasi Umum (DAU = X2)	0,869	1,150
Belanja Modal (BM = Z)	0,743	1,347

a. Dependent Variable: Pendapatan Perkapita (PP = Y)

Uji Heteroskedastisitas Persamaan Pertama



Uji Heteroskedastisitas Persamaan Kedua



Uji Glejser Persamaan Pertama

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2283301197,922	849303956,012		2,688	0,011
Pendapatan Asli Daerah (PAD = X1)	-0,058	0,036	-0,269	-1,625	0,113
Dana Alokasi Umum (DAU = X2)	0,002	0,003	0,073	0,443	0,660

a. Dependent Variable: AbsRes2

Uji Glejser Persamaan Kedua

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	16800825,248	14691777,565		1,144	0,260
Pendapatan Asli Daerah (PAD = X1)	0,000	0,001	-0,156	-0,829	0,412
Dana Alokasi Umum (DAU = X2)	-6,276E-05	0,000	-0,214	-1,233	0,226
Belanja Modal (BM = Z)	0,001	0,001	0,109	0,582	0,564

a. Dependent Variable: AbsRes1

Uji Durbin-Watson Persamaan Pertama

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,507 ^a	0,257	0,217	1425578507,74093	1,882

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum (DAU = X2), Pendapatan Asli Daerah (PAD = X1)

b. Dependent Variable: Belanja Modal (BM = Z)

Uji Durbin-Watson Persamaan Kedua

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,363 ^a	0,132	0,060	16447983,30624	1,935

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal (BM = Z), Dana Alokasi Umum (DAU = X2), Pendapatan Asli Daerah (PAD = X1)

b. Dependent Variable: Pendapatan Perkapita (PP = Y)

Lampiran 8 *Output* SPSS Analisis Jalur**Uji Regresi Linear Berganda Persamaan Pertama****Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	6211207494,858	1532730227,916		4,052	0,000		
Pendapatan Asli Daerah (PAD = X1)	0,184	0,064	0,426	2,854	0,007	0,901	1,110
Dana Alokasi Umum (DAU = X2)	-0,007	0,006	-0,172	-1,153	0,256	0,901	1,110

a. Dependent Variable: Belanja Modal (BM = Z)

Uji Regresi Linear Berganda Persamaan Kedua**Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	50313424,056	21249348,372		2,368	0,023		
Pendapatan Asli Daerah (PAD = X1)	0,002	0,001	0,413	2,283	0,028	0,738	1,355
Dana Alokasi Umum (DAU = X2)	6,937	0,000	0,157	0,942	0,352	0,869	1,150
Belanja Modal (BM = Z)	-0,001	0,002	-0,129	-0,716	0,479	0,743	1,347

a. Dependent Variable: Pendapatan Perkapita (PP = Y)

Lampiran 9 Output SPSS Uji Hipotesis

Uji T Persamaan Pertama**Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	6211207494,858	1532730227,916		4,052	0,000
	Pendapatan Asli Daerah (PAD = X1)	0,184	0,064	0,426	2,854	0,007
	Dana Alokasi Umum (DAU = X2)	-0,007	0,006	-0,172	-1,153	0,256

a. Dependent Variable: Belanja Modal (BM = Z)

Uji T Persamaan Kedua**Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	50313424,056	21249348,372		2,368	0,023
	Pendapatan Asli Daerah (PAD = X1)	0,002	0,001	0,413	2,283	0,028
	Dana Alokasi Umum (DAU = X2)	6,937E-05	0,000	0,157	0,942	0,352
	Belanja Modal (BM = Z)	-0,001	0,002	-0,129	-0,716	0,479

a. Dependent Variable: Pendapatan Perkapita (PP = Y)

Uji F Persamaan Pertama**ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	26069663183541700000,000	2	13034831591770800000,000	6,414	,004 ^b
	Residual	75194141024115800000,000	37	2032274081732860000,000		
	Total	101263804207657000000,000	39			

a. Dependent Variable: Belanja Modal (BM = Z)

b. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum (DAU = X2), Pendapatan Asli Daerah (PAD = X1)

Uji F Persamaan Kedua**ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1481344870292330,000	3	493781623430777,000	1,825	,160 ^b
	Residual	9739301574326090,000	36	270536154842391,000		
	Total	11220646444618400,000	39			

a. Dependent Variable: Pendapatan Perkapita (PP = Y)

b. Predictors: (Constant), Belanja Modal (BM = Z), Dana Alokasi Umum (DAU = X2), Pendapatan Asli Daerah (PAD = X1)

Koefisien Determinasi Persamaan Pertama**Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	,507 ^a	0,257	0,217

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum (DAU = X2), Pendapatan Asli Daerah (PAD = X1)

b. Dependent Variable: Belanja Modal (BM = Z)

Koefisien Determinasi Persamaan Kedua**Model Summary^b**

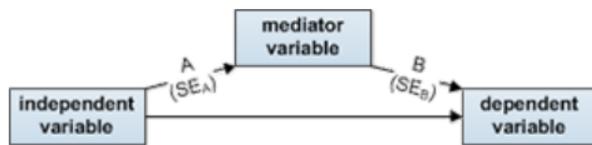
Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	,363 ^a	0,132	0,060

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal (BM = Z), Dana Alokasi Umum (DAU = X2), Pendapatan Asli Daerah (PAD = X1)

b. Dependent Variable: Pendapatan Perkapita (PP = Y)

Lampiran 10 *Output* SPSS Uji Sobel

Kalkulator Uji Sobel Persamaan Pertama



A: ?

B: ?

SE_A: ?

SE_B: ?

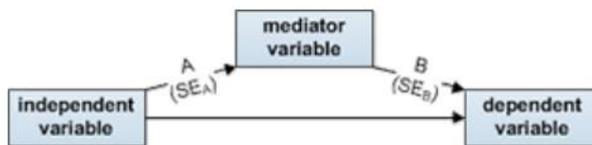
Calculate!

Sobel test statistic: -0.49260588

One-tailed probability: 0.31114555

Two-tailed probability: 0.62229109

Kalkulator Uji Sobel Persamaan Kedua



A: ?

B: ?

SE_A: ?

SE_B: ?

Calculate!

Sobel test statistic: 0.45957252

One-tailed probability: 0.32291155

Two-tailed probability: 0.64582309

Lampiran 11 LOA

LETTER OF ACCEPTANCE



Yth:
Titania Saputri
Universitas Negeri Gorontalo

Terima kasih telah mengirimkan naskah artikel pada “**Jambura: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis**”
Berdasarkan hasil review, artikel dengan judul:

**“PENGARUH PAD DAN DAU TERHADAP PENDAPATAN PERKAPITA MELALUI BELANJA MODAL
SEBAGAI VARIABEL INTERVENING”**

Dinyatakan **DITERIMA** dan akan diterbitkan pada edisi Volume 7, Nomor 2, September 2024.
Terbitan dapat diakses melalui laman jurnal <https://ejournal.ung.ac.id/index.php/JIMB>

Gorontalo, 22 Mei 2024

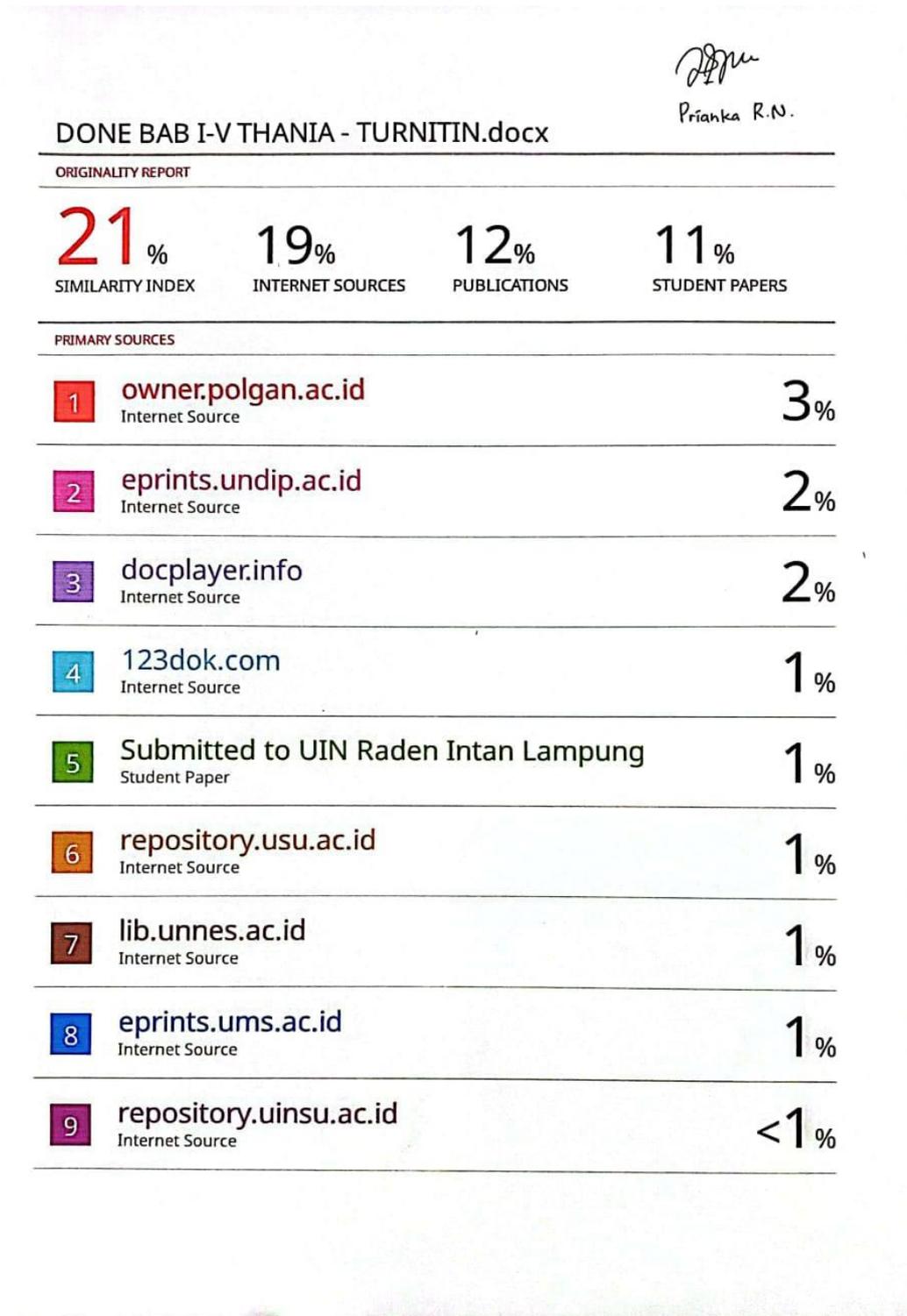
Editor in Chief



Rezkianan Tamawati, SE., MM
NIP. 199112242022031005

JIMB
Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis
Universitas Negeri Gorontalo

Lampiran 12 Turnitin

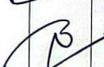
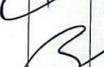


Lampiran 13 Buku Bimbingan

PEMBIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Pembimbing I

Nama : Dr. Baga Kurniawan, S.Kom., M.M.

No.	Tanggal	Keterangan	Paraf
1.	31/10/2023	Me. Jelas 16/10/2023	
2.	31/11/2024	Bab I - II	
3.	27/3/2024	Revisi Bab I - III	
4.	23/4/2024	Revisi Bab IV	
5.	30/4/2024	ACC Skripsi	 

PEMBIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Pembimbing II

Nama : Rita Meiriganti, SE., M.M.

No.	Tanggal	Keterangan	Paraf
1.	31/10/2023	ACC Judul	
2.	27/3/2024	Bab I - II	
3.	27/3/2024	Revisi bab 1, 2	
4.	2/5 - 24	Revisi pembahasan siapan jurnal	
5.	3/5 - 24	ACC Skripsi	